



Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Biro Perencanaan dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal DPR RI

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

## TRIWULAN 2

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# 2025



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan II Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan agenda reformasi yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Reformasi Birokrasi selama Triwulan II Tahun 2025, yang mencakup aspek-aspek tata kelola pemerintahan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh unit kerja. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempercepat pelaksanaan reformasi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung tercapainya target Reformasi Birokrasi yang lebih optimal ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Juni 2025  
Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmad' followed by a stylized flourish.

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si

## A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan agenda nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Sebagai *supporting system* dari lembaga legislatif, Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI. Untuk itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi langkah penting dalam memastikan tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendorong capaian Reformasi Birokrasi secara terukur dan berkelanjutan, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk menilai progres, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja yang mendukung Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi. Maka, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses implementasi program-program Reformasi Birokrasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga menjadi instrumen pengawasan internal yang penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga awal tahun 2025 ini, *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbaru belum secara resmi diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan arah strategis dan acuan teknis bagi instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam merumuskan agenda Reformasi Birokrasi. Meskipun begitu, upaya perbaikan birokrasi tetap dilaksanakan secara adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki peran sebagai *supporting system* bagi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi DPR RI.

Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Triwulan II Tahun 2025 menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai mekanisme kontrol internal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui laporan ini, diharapkan tersedia data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan agenda reformasi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya dokumentasi dan akuntabilitas atas langkah-langkah strategis dalam mendukung transformasi birokrasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan II Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI guna meningkatkan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI.

## LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN II TAHUN 2025

### SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Reformasi Birokrasi (RB) General difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar, khususnya perbaikan sistem dan tata kelola internal di lingkungan instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General dimaksudkan agar pencapaian target strategis Reformasi Birokrasi dapat lebih terarah dan dipercepat secara menyeluruh, sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB 2020–2024. Pada level instansi atau mikro, pelaksanaan RB mencakup penerapan kebijakan dan program RB yang telah dirumuskan pada tingkat makro dan meso, serta pelaksanaan inovasi RB yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang penajaman *Road Map* RB Nasional, penilaian RB kini mencakup dua komponen utama: RB General dan RB Tematik. RB General di Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kegiatan Utama, sedangkan RB Tematik difokuskan pada lima tema utama yang mendukung sasaran Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan II Tahun 2025.

#### A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN II TAHUN 2025

##### 1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyampaian Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Surat Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Jawaban atas Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Kajian Penyederhanaan Birokrasi	Penyusunan Kajian Penyederhanaan Birokrasi	-	-	1	-	Rp. 84.562.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Usulan Penyederhanaan Birokrasi	Surat Usulan Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penetapan Struktur Organisasi berdasarkan Surat Persetujuan Penataan Organisasi	Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Penyederhanaan Birokrasi	Laporan Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi monitoring dan evaluasi penyederhanaan birokrasi telah dilaksanakan pada Triwulan II untuk mendukung implementasi penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tetap berjalan pada jalurnya, selaras dengan kerangka regulasi nasional, sekaligus mempertimbangkan fleksibilitas dan kekhususan lembaga legislatif. Penyusunan dilakukan dengan penyampaian kronologis langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses penyederhanaan birokrasi, meliputi penyederhanaan tahap I yang dilakukan di lingkungan Biro SDM Aparatur, penyederhanaan tahap II yang dilakukan di lingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat serta Biro Keuangan, penyampaian Surat Permohonan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Struktur Organisasi, serta keikutsertaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai responden dalam survei evaluasi atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, didapat kesimpulan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki karakteristik kelembagaan yang khas sebagai pendukung DPR RI sebagai lembaga legislatif. Kekhususan tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dukungan persidangan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Persidangan. Pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan memiliki beban kerja koordinatif yang tinggi,

bersinggungan langsung dengan dinamika kerja politik, serta memerlukan struktur organisasi yang hierarkis untuk memastikan ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan Keputusan.

Mengacu pada hasil identifikasi, laporan monitoring dan evaluasi memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti surat permohonan izin prinsip keleluasaan terbatas penyederhanaan struktur organisasi agar dapat diberikan pengakuan formal terhadap pendekatan keleluasaan terbatas yang diajukan. Melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan RB diharapkan tidak hanya memenuhi indikator administratif, tetapi juga benar-benar berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi, tata kelola kelembagaan, dan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan, khususnya DPR RI.

Anggaran yang dialokasikan untuk rencana aksi indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah Rp84.562.000,00. Realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp39.005.000,00, atau 46,12%, digunakan untuk kegiatan rapat.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/q5QpDJR3bbTSZJ3>

## 2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	4	4	Biro Perencanaan dan Organisasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Penyusunan Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI	-	1	-	-	Rp. 61.760.000	Telah terlaksana
Integrasi Implementasi Sistem Kerja Baru ke dalam Sistem Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI	Tangkapan layar Aplikasi Hasil Integrasi	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Sosialisasi Sistem Kerja Baru	Laporan Sosialisasi Sistem Kerja Baru	-	-	1	-	Rp. 32.200.000	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
							dilaksanakan pada Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Baru	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Baru	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Sistem Kerja Baru	Laporan Sistem Kerja Baru	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi penyusunan Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah dilaksanakan. Proses penyusunan dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor: 07/OT/01/2025. Berdasarkan hasil rapat, Tim menyepakati untuk memisahkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur tentang Sistem dan Mekanisme Kerja dengan Tim Kerja (*Squad Team*). Pemisahan tersebut bertujuan untuk memudahkan unit kerja dalam memahami prosedur dan mekanisme terkait pembentukan *squad team*. Hingga saat laporan ini disusun, Tim masih menyusun draft Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan *Squad Team* di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selanjutnya, rencana aksi monitoring dan evaluasi Sistem Kerja Baru juga telah dilaksanakan berdasarkan pemenuhan atas rekomendasi Kementerian PANRB, untuk mencapai nilai 5 (nilai maksimal), dibutuhkan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 5 (lima) SOP dari Bagian Administrasi Keuangan dan 2 (dua) SOP dari Bagian SDM Aparatur yang telah dilakukan perbaikan dan pengembangan menyesuaikan dengan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi.

Anggaran yang dialokasikan untuk rencana aksi indikator Capaian Sistem Kerja ASN Adalah Rp93.960.000,00. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan rapat dan sosialisasi yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/PNrFME49tLZDiYC>

3. **Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:**  
a. **Indeks SPBE**

<i>Leading Sector</i>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	4,23	4,23	Pusat Teknologi Informasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis BPMN	Peta Proses Bisnis berbasis BPMN	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan TIK	Laporan Pengembangan Aplikasi Penerapan Manajemen Perubahan Layanan TIK	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal	Laporan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis *Business Process Model and Notation* (BPMN) telah terlaksana melalui kegiatan pelatihan Transisi Arsitektur Pemerintah sebagai langkah awal untuk memperkuat pemahaman pegawai mengenai penyusunan peta proses bisnis berbasis BPMN. Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah dalam mengembangkan kerangka kerja proses yang terdokumentasi, terstandardisasi, dan dapat diintegrasikan secara digital lintas unit kerja.

Sebagai hasil konkret dari kegiatan tersebut, telah disusun satu proses bisnis prioritas dalam bentuk BPMN, yaitu Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi. Proses ini dipilih berdasarkan urgensi dan relevansinya terhadap penguatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyusunan BPMN untuk proses ini bertujuan untuk memperjelas alur eskalasi, penanganan, serta pelaporan insiden keamanan informasi secara sistematis, sekaligus mendukung pelaksanaan audit dan pengendalian internal yang lebih baik. Proses ini juga menjadi percontohan awal yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proses bisnis lainnya ke depan. Penyusunan proses bisnis BPMN tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan unit-unit terkait serta mengacu pada kerangka regulasi internal dan standar nasional dalam pengelolaan insiden keamanan. Langkah ini menandai dimulainya fase transisi dari pendekatan dokumentasi naratif ke dalam format visual-proses BPMN yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan digitalisasi layanan. Keberhasilan

penyusunan satu proses bisnis ini diharapkan menjadi landasan untuk mempercepat pengembangan proses-proses bisnis lainnya secara bertahap dan terintegrasi pada triwulan berikutnya.



Gambar 1.1 *Workshop* “Transisi Arsitektur Pemerintah Digital 2025-2029”

Selanjutnya, pada rencana aksi penerapan manajemen perubahan pada layanan TIK telah terlaksana secara konsisten melalui penetapan aplikasi STELA (Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan) sebagai media utama dalam pengelolaan proses perubahan layanan. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Tim Pengelola Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 58/SEKJEN/2025, yang mendukung implementasi ISO/IEC 20000 dan memastikan setiap perubahan layanan tercatat, dikelola, dan ditindaklanjuti dengan pendekatan yang terstandarisasi.

Pada Februari 2025, salah satu penerapan nyata manajemen perubahan adalah pengembangan fitur *rating* pada aplikasi STELA. Upaya ini merupakan bagian dari strategi penguatan layanan berbasis standar internasional dan peningkatan pengalaman pengguna internal terhadap sistem pengelolaan layanan teknologi informasi yang lebih terstruktur dan responsif.

Pencapaian penting pada periode ini adalah diterbitkannya Sertifikat ISO 20000-1:2018 bagi Pusat Teknologi Informasi pada tanggal 23 Juni 2025, dengan ruang lingkup Penyediaan Layanan Jaringan Komputer (Internet) pada Aplikasi STELA di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sertifikasi ini berlaku hingga 22 Juni 2028 dan menjadi pengakuan formal bahwa pengelolaan layanan yang dilakukan telah memenuhi standar mutu internasional. Hal ini menunjukkan bahwa proses-proses dalam STELA—mulai dari permintaan layanan, eskalasi insiden, hingga dokumentasi dan umpan balik—telah disusun dan dijalankan dengan pendekatan berbasis siklus perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka memenuhi indikator 27 (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan), telah disusun Tim Manajemen Perubahan yang terdapat pada Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 58/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, bahwa sudah selaras dengan Pedoman Perubahan PANRB Nomor 10 Tahun 2022 dan *Framework* IT-IL.

Selaras dengan komitmen tersebut, pengembangan fitur STELA pada Triwulan II diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan efisiensi kerja petugas layanan. Beberapa fitur yang dikembangkan mencakup penambahan kelengkapan kolom data di halaman petugas, pembatasan *dropdown* Sub Layanan berdasarkan jenis Layanan, penambahan riwayat tiket per petugas dalam periode tahun berjalan, serta penambahan detail masalah dan *flag* "Penanganan Lanjutan" pada tampilan petugas. Pengembangan ini tidak hanya memperkaya fungsionalitas sistem, tetapi juga memperbaiki alur kerja internal agar lebih ringkas, akurat, dan sesuai konteks penanganan tiap tiket.

Dengan hadirnya fitur-fitur baru tersebut, aplikasi STELA menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan unit kerja teknis. Proses penanganan tiket dapat dimonitor secara lebih efektif, validasi data menjadi lebih ketat, dan eskalasi dapat dilakukan dengan informasi yang lebih lengkap. Evaluasi penggunaan STELA akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dan mendukung target peningkatan kualitas layanan digital sesuai arah kebijakan SPBE nasional.



Gambar 1.2 Sertifikat ISO 20000-1:2-18

Kemudian sehubungan dengan rencana aksi Pelaksanaan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal, Pusat Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat penyusunan Rencana Kerja SPBE pada 19 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, narasumber eksternal Ahmad Baehaqi, S.Si., M.T.—yang juga merupakan asesor SPBE Tahun 2024 dari Universitas Padjajaran—memberikan rekomendasi penting terkait perlunya pelaksanaan audit eksternal sebagai bentuk validasi objektif terhadap tata kelola dan keamanan layanan TIK yang telah berjalan.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB pada tahun 2024, di mana nilai untuk indikator 29 (Audit Infrastruktur SPBE), indikator 30 (Audit Aplikasi SPBE), dan indikator 31 (Audit Keamanan SPBE) masih berada pada Level 3. Artinya, penerapan audit sudah dilakukan secara rutin namun belum sepenuhnya terdokumentasi atau belum melibatkan pihak independen dari luar instansi. Untuk itu, Pusat Teknologi Informasi mendorong pelaksanaan audit eksternal yang terencana dan terdokumentasi guna memperkuat pemenuhan indikator serta meningkatkan kredibilitas dan efektivitas audit yang dilakukan.

Narasumber juga menekankan pentingnya peran auditor internal sebagai jembatan ketika auditor eksternal menemukan temuan audit. Dokumentasi hasil audit internal yang terdahulu akan menjadi bukti bahwa instansi telah melakukan pengawasan internal dan perbaikan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan level kematangan SPBE sekaligus memastikan bahwa proses pengelolaan TIK berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko yang kuat.



Gambar 1.3 Rapat Koordinasi Persiapan Audit TIK dan Audit Keamanan

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/sEJJoKngXryinYm>

**b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	3	3	Pusat Teknologi Informasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Arsitektur SPBE dan sosialisasi kepada unit terkait	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027	Laporan Pemutakhiran Arsitektur SPBE To-Be pada SIA SPBE V2	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Standar Manajemen Data	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI telah terlaksana dan telah mencapai tahapan penting dengan tersusunnya 2 (dua) dokumen strategis dalam bentuk draft Surat Keputusan, yaitu draft Surat Keputusan Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025–2027 serta draft SK Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025–2027. Kedua draft ini memuat arah strategis, prinsip arsitektur, domain utama (proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan), serta peta jalan pengembangan sistem digital terintegrasi di lingkungan DPR RI. Dokumen ini disusun agar selaras dengan dokumen RITIK Nasional dan kebijakan Arsitektur SPBE Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memastikan tersedianya landasan hukum dan arah kebijakan yang jelas terhadap pembangunan dan pengelolaan arsitektur SPBE di instansi, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Selanjutnya, rencana aksi penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027 telah terlaksana dengan salah satu capaian utamanya adalah penyusunan model proses bisnis (BPMN) Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi sebagai artefak arsitektur dalam domain proses bisnis yang merupakan salah satu keluaran dari kegiatan Pelatihan Transisi Arsitektur Pemerintah. Proses ini dipilih sebagai prioritas karena berkaitan langsung dengan aspek pengendalian risiko keamanan informasi serta mendukung pemenuhan indikator SPBE

terkait pengelolaan keamanan TI. Model BPMN tersebut menggambarkan secara lengkap alur penanganan insiden mulai dari pelaporan, validasi, penentuan tindak lanjut, hingga penyusunan laporan akhir dan komunikasi publik (jika diperlukan).

Model yang disusun telah diunggah secara resmi ke dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) versi 2 sebagai bagian dari pemutakhiran struktur arsitektur To-Be. Dalam diagram tersebut, proses melibatkan aktor lintas fungsi seperti Auditor, Pengelola Aplikasi, Tim Keamanan Informasi, serta Unit Humas. Dengan demikian, selain menjadi acuan teknis, model ini juga berfungsi sebagai dokumentasi proses yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi SOP operasional dan referensi audit SPBE.

Penyempurnaan ini merupakan lanjutan dari proses reviu RITIK yang dilakukan pada Triwulan I, dimana hasil masukan para pakar dan Kementerian PANRB menekankan pentingnya konsistensi antara struktur arsitektur dan arah transformasi digital nasional. Ke depan, penyempurnaan akan diperluas ke domain arsitektur lainnya seperti aplikasi, data, dan infrastruktur, sehingga keseluruhan arsitektur SPBE DPR RI dapat tergambar secara utuh dan berorientasi pada interoperabilitas serta layanan publik yang terintegrasi.

Kemudian rencana aksi penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi telah terlaksana melalui penyusunan draft Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai bentuk kebijakan standar dalam pengelolaan data sektoral di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Draft ini memuat struktur pengelolaan statistik sektoral mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian dan diseminasi data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Penyusunan Petunjuk Teknis ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi teknis yang telah dilakukan bersama BPS (Badan Pusat Statistik) pada Triwulan I, yang menghasilkan kesepakatan mengenai kerangka evaluasi dan penjaminan kualitas data sektoral.

Langkah ini memperkuat peran Pusat Teknologi Informasi sebagai koordinator walidata di lingkungan internal DPR RI serta mendukung integrasi dengan sistem data nasional. Selain sebagai wujud pemenuhan indikator arsitektur SPBE, Petunjuk Teknis ini juga akan menjadi pedoman bagi unit kerja dalam menyusun SOP Teknis Pengelolaan Data dan memastikan bahwa proses manajemen data dilakukan secara akuntabel dan terdokumentasi. Ke depannya, dokumen ini akan difinalisasi melalui proses legalisasi dan diseminasi kepada seluruh unit.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rM3J35Cjtc6d4Tf>

4. **Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Indeks Perencanaan Pembangunan**

<i>Leading Sector</i>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	94,42	94,5	Biro Perencanaan dan Organisasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Konsistensi Rencana Kerja K/L terhadap Rencana Strategis K/L	Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rencana Kerja DPR RI TA 2025	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Dokumen Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Strategis dengan Rencana Kerja	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Kesesuaian Pagu Anggaran RKA K/L dengan Pagu Anggaran Rencana Kerja K/L	Dokumen Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA K/L TA 2025	1	1	1	1	Rp. 0	Belum terlaksana

Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan. Dalam menyusun Rencana Strategis DPR RI, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti evaluasi kinerja DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukungnya, serta wawancara dan diskusi dengan pakar maupun akademisi untuk mendapatkan pandangan dan masukan terkait capaian DPR RI sepanjang 2020-2024, termasuk dengan Anggota DPR RI Periode 2020-2024. Dalam rangka menguatkan Rencana Strategis DPR RI, juga telah dilakukan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai Kementerian terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, maupun BPS. Proses keseluruhan penyusunan Rencana Strategis DPR RI telah berjalan sejak November 2023 sampai dengan Mei 2025. Artinya penyusunan Rancangan Rencana Strategis DPR RI telah dilakukan secara simultan dan sejalan dengan pembahasan Rancangan UU tentang RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan RPJMN 2025-2029. Akhirnya, pasca dibentuknya Panja Rencana Strategis DPR RI di BURT pada 4 Desember 2024, Rancangan Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 mulai dibahas dalam Rapat Panja BURT pada 4 Februari 2025.

Kemudian, setelah melalui beberapa kali pembahasan dalam Panja BURT, Rapat Pleno BURT pada 21 Mei 2025 memutuskan menerima Laporan Panja BURT tentang Rencana Strategis DPR RI 2025-2029. Dalam masa pembahasan tersebut, BURT juga telah mengirimkan surat maupun melakukan konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan penetapan payung hukum Rencana Strategis DPR RI 2025-2029. Mengingat materi pengaturan dalam Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa “Kementerian/Lembaga menetapkan Rancangan Renstra K/L menjadi Renstra K/L dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga paling lambat 5 (lima) bulan setelah RPJMN diundangkan”. Artinya *deadline* penetapan Rencana Strategis K/L adalah tanggal 10 Juli 2025, karena Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025-2029 baru diundangkan pada 10 Februari 2025.

Selanjutnya, telah diselenggarakan Rapat Pimpinan DPR RI pada 26 Mei 2025 yang memutuskan bahwa menugaskan pembahasan terkait payung hukum Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 akan dilaksanakan oleh salah satu Pimpinan DPR RI, yaitu Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. bersama Badan Keahlian DPR RI. Telah dilakukan juga beberapa kali konsultasi kepada Pimpinan DPR RI, baik terkait dengan Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 maupun payung hukum Rencana Strategis DPR RI.

Setelah dilakukan penyempurnaan menindaklanjuti masukan Pimpinan DPR RI, dilakukan kembali Rapat Pimpinan DPR RI pada tanggal 30 Juni 2025 yang menetapkan bahwa payung hukum Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 adalah Peraturan DPR RI, dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, dan diharapkan sudah dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI berikutnya, yaitu tanggal 8 Juli 2025. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Selanjutnya, dilakukan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 30 Juni 2025 yang memutuskan untuk mendengarkan pandangan fraksi terkait Rencana Strategis DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025. Setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi yang seluruhnya menyampaikan dukungan terhadap Rencana Strategis DPR RI 2025-2029, Paripurna DPR RI menyepakati bahwa payung hukum Rencana Strategis DPR RI adalah Peraturan DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Legislatif. Dengan demikian, dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025 masih dalam proses pembentukan payung hukum Rencana Strategis DPR RI yang selanjutnya akan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025.



Gambar 1.4 Konsultasi Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. bersama Badan Keahlian DPR RI

Sedangkan rencana aksi Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA K/L TA 2025 belum terlaksana dikarenakan adanya kendala *error* pada sistem.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yLw9zjk2t7Q2Nn8>

**5. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi:  
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	68,92	80	Biro Perencanaan dan Organisasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Penyusunan Rencana Strategis DPR RI 2025 - 2029	Dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025 - 2029 pasca sinkronisasi dengan RPJMN	-	-	1	-	Rp. 47.300.400	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Penjenjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Dokumen Penjenjangan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2025	Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI pra-penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025- 2029	26	-	-	-	Rp. 16.415.000	Telah terlaksana
	Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II pasca Penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	-	-	26	-	Rp. 49.245.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Perjanjian	-	26	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
dengan penetapan target dan mencantumkan realisasi per-triwulan yang telah dikuantifikasi dan dapat diukur	Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI						
	Dokumen Rencana Aksi atas perubahan Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	26	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisasi yang andal	Dokumen Penetapan Pedoman Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi	-	-	1	-	Rp. 6.699.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
	Laporan Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Laporan Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja Organisasi	1	-	-	-	Rp.100.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja	1	1	1	1	Rp. 64.200.000	Telah terlaksana
Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Laporan Sosialisasi Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 145.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014	Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan Biro Perencanaan dan Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014	2	-	-	-	Rp. 99.230.000	Telah terlaksana
	Laporan Kinerja Deputy, Kepala Badan, dan Inspektur Utama, serta Eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014	24	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Evaluasi Internal atas Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	-	21	5	-	Rp. 66.825.000	Belum terlaksana
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Internal AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Internal AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	-	21	5	-	Rp. 0	Belum terlaksana

Rencana aksi penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 telah terlaksana. Dalam kegiatan ini, Bagian PKORB telah mengirim surat pada tanggal 22 Januari 2025 kepada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II untuk mengunggah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja melalui tautan yang telah disediakan oleh Bagian PKORB. Pengisian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini merupakan dasar bagi unit kerja dalam

mengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Unit Kerja masing-masing dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.

Selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja. Dokumen ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi kemajuan, hambatan, serta tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh unit kerja dalam proses penyusunan sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang dihasilkan bersifat realistis, aplikatif, dan mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam pencapaian kinerja. Dengan begitu, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga alat strategis dalam mendorong budaya kerja yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil.

Selanjutnya, rencana aksi Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang dipimpin oleh Bapak Deputy Bidang Administrasi pada tanggal 17 Juni 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI. Arahannya penting dalam rapat tersebut yang telah ditindaklanjuti adalah terkait kelengkapan data kegiatan yang dilakukan dalam mencapai *output*. Dalam menindaklanjuti arahan ini, Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyesuaikan beberapa hal di dalam desain sistem informasi yang juga memunculkan pilihan bagi Unit Kerja untuk menunjukkan berbagai kegiatan dalam mencapai *output*.

Kemudian, rencana aksi Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal juga telah dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas salah satu rekomendasi Kementerian PANRB, yaitu meningkatkan pemanfaatan aplikasi untuk pengukuran kinerja organisasi melalui *dashboard* PKO (Pengelolaan Kinerja Organisasi), dengan tujuan untuk memantau capaian kinerja organisasi secara berkala, baik dari sisi kinerja (*outcome*), *output*, maupun serapan anggaran.

Sistem Penilaian Kinerja yang dikembangkan oleh Bagian PKORB bernama SPEKTRO+ atau Sistem Penilaian Kinerja Terintegrasi Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI Plus. Pengembangan aplikasi ini dibangun mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan 4 (empat) komponen SAKIP, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.

Rencana aksi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja telah dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sistem informasi manajemen kinerja organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan monitoring kinerja triwulanan yang dilakukan menggunakan metode perbandingan realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi.

Sedangkan rencana aksi Pelaksanaan Penerapan *Reward* dan *Punishment* Kinerja Organisasi belum terlaksana pada Triwulan II dikarenakan terdapat perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seiring ditetapkannya Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029. Perlu dilaporkan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun pada masa transisi dimana Rencana Strategis belum ditetapkan maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 awal menggunakan rumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Oleh karena itu, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/MjMx7txYbfBc8Fw>

**6. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	0 unit	3 unit	Inspektorat I dan II

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, dan/atau Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025	Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target Reformasi Birokrasi sesuai rencana atas indikator ZI	1	1	1	1	Rp. 7.425.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI	LKE Unit ZI	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat Pengajuan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Proses evaluasi oleh TPN	Hasil Konfirmasi Progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
							dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 telah terlaksana kepada 8 (delapan) unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang sedang melaksanakan Pembangunan ZI, diantaranya yaitu:

1. Biro Persidangan I;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Pusat Teknologi Informasi;
5. Biro Pemberitaan Parlemen;
6. Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Biro Keuangan; dan
8. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

Diantara unit kerja yang sedang melaksanakan Pembangunan ZI tersebut, terdapat 7 (tujuh) unit kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN), yaitu:

1. Biro Persidangan I;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Pusat Teknologi Informasi;
5. Biro Pemberitaan Parlemen;
6. Biro Keuangan; dan
7. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

Seluruh unit kerja yang diusulkan kepada TPN tersebut telah lolos Seleksi Administrasi. Saat ini, Kementerian PANRB sedang melaksanakan analisis dokumen untuk kemudian diumumkan unit kerja mana saja yang akan melanjutkan ke tahap Desk Evaluasi dan Wawancara.

Kemudian rencana aksi Pembangunan dan Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI juga telah terlaksana kepada kepada 8 (delapan) unit kerja yang sedang melaksanakan Pembangunan ZI. Begitu pula dengan rencana aksi Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yang telah terlaksana dengan terbitnya Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/7219/OT.05.01/5/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/QbdCNWJGrcxPkaA>

**7. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
BPKP	3,6	3,69	Inspektorat II

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tim Penilaian Mandiri (PM) dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI atau Surat Tugas tentang Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi SPIP	-	1	1	-	Rp. 5.250.000	Telah terlaksana
Penyesuaian Dokumen Perencanaan Kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya dan memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran	Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja Perjanjian Kinerja	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana
Mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI	<i>Risk Register</i> dan Laporan Evaluasi <i>Risk Register</i> dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyesuaikan kebijakan manajemen risiko dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 10 Tahun 2021 dengan kebijakan terkait integrasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 10 Tahun 2021	-	-	1	-	Rp. 4.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Risiko Instansi dengan menambahkan pihak yang terdampak dari setiap uraian risiko dan tren risiko yang muncul di setiap unit kerja	Laporan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Instansi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melakukan monitoring dan dievaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem antikorupsi yang sudah ada (FCP)	Laporan atas Monitoring dan Evaluasi Atas Pedoman, Peta Proses Bisnis dan SOP	-	-	-	1	Rp. 4.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 telah terlaksana dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 240/SEKJEN/2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Sekretariat jenderal DPR RI Tahun 2025 yang ditandatangani pada Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 22 Januari 2025.

Untuk kegiatan PM dan PK SPIP Terintegrasi sendiri, sebagian besarnya telah selesai dilaksanakan dengan pengisian dan penyusunan eviden yang lengkap di sebagian besar unit kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa unit kerja, yaitu Badan Keahlian, Deputy Administrasi, dan Biro Perencanaan dan Organisasi, yang saat ini masih dalam proses melengkapi pengisian tabel LKE PM (Penetapan Tujuan, Penilaian Capaian *Outcome* dan *Output*) dan PK SPIP Terintegrasi. Kegiatan penilaian dan pengumpulan eviden di unit-unit tersebut masih terus berjalan hingga seluruh data yang diperlukan dapat terpenuhi secara lengkap.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/jDQidgXPEQL2cBJ>

**8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)**

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	5	5	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Pengaduan Masyarakat	Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	-	1	-	-	Rp. 8.100.000	Telah terlaksana
Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Kementerian/Lembaga terkait pengaduan	Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pengaduan (teradu pengaduan masyarakat)	-	-	1	-	Rp. 22.733.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1	-	-	-	Rp. 5.850.000	Telah terlaksana
Bimbingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	SDM yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat	-	-	1	-	Rp. 51.600.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR dan Sidumas	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR dan Sidumas	-	-	-	2	Rp. 4.050.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat telah terlaksana pada tanggal 23 Juni 2025 dengan mengundang seluruh pejabat penghubung di AKD DPR RI.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/fEyzozq6kajfyef>

#### 9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,15	78	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan ZI Tahun 2025	Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target RB sesuai rencana atas indikator ZI	1	1	1	1	Rp. 7.425.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi, dan/atau Monitoring dan Evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025	Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target RB sesuai rencana atas indikator SPI	1	1	1	1	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Anti Corruption Week pada hari Anti Korupsi Dunia	Membangun budaya integritas dan sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Kegiatan Pemenuhan Data Responden Internal, Eksternal, dan Ekspert untuk pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025	Mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Evaluasi terkait Kebijakan dan SOP Anti Korupsi serta implementasinya	Membangun budaya integritas dan sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi	-	1	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana aksi pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 telah terlaksana kepada 8 (delapan) unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI yang sedang melaksanakan Pembangunan ZI dan 7 (tujuh) unit kerja diantaranya telah diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN), diantaranya yaitu:

1. Biro Persidangan I;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Pusat Teknologi Informasi;
5. Biro Pemberitaan Parlemen;
6. Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Biro Keuangan; dan
8. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

Seluruh unit kerja yang diusulkan kepada TPN untuk melaksanakan Pembangunan ZI tersebut telah lolos Seleksi Administrasi. Saat ini, Kementerian PANRB sedang melaksanakan analisis dokumen untuk kemudian diumumkan unit kerja mana saja yang akan melanjutkan ke tahap Desk Evaluasi dan Wawancara.

Kemudian, rencana aksi Monitoring dan Evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 telah terlaksana dengan metode analisis dokumen pada tanggal 16 s.d. 23 April 2025. Begitu juga dengan rencana aksi evaluasi terkait Kebijakan dan SOP Anti Korupsi serta implementasinya telah terlaksana pada tanggal penugasan 14 s.d. 25 April 2025 yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif diterapkan dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan celah risiko dalam prosedur yang ada. Evaluasi yang dilakukan ini juga mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan

agar lebih relevan dan aplikatif, serta memperkuat budaya integritas dan kepatuhan di lingkungan kerja. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dan lembaga pengawas, memastikan kepatuhan terhadap standar seperti ISO 37001:2016, serta meningkatkan kepercayaan publik.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/mFGMZPextsbjzFF>

#### 10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	100	100	Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Membuat Surat Pernyataan terkait Variabel I IRH ke Kementerian Hukum	Surat Pernyataan terkait Variabel I IRH ke Kementerian Hukum	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Menyusun TOR terkait Pelatihan Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan	TOR Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	TOR Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 75.600.000	Telah terlaksana
	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Surat Keputusan dan Surat Tugas Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Laporan Hasil Kajian dan	Dokumen Daftar Undang-Undang	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi Undang-Undang	yang telah dilakukan evaluasi						
	Dokumen Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	8	7	7	3	Rp. 273.985.000	Telah terlaksana
Mengirim Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen bukti dukung Pengiriman Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Dokumen Rekap Data Pejabat Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang	Dokumen Rekap Data Pejabat Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan pengumpulan Data Dukung Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Dokumen Terkait Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking</i> , <i>Konsinyering</i> )	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>	-	1	-	-	Rp. 25.080.000	Telah terlaksana
Melaksanakan pelaporan Pengembangan JDIH melalui <i>e-Report</i>	<i>Screenshot</i> bukti pengisian <i>e-Report</i>	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke Website JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengumpulkan <i>Capture</i> Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	<i>Screenshot Dashboard</i> Portal JDIH	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Mengunggah aktifitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	<i>Screenshot</i> bukti <i>upload</i> di media sosial	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun Rekapitulasi Data Produk Hukum	Dokumentasi Hasil	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
yang telah diunggah di JDIH	Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah di unggah di JDIH						Triwulan IV

Selama Triwulan II Tahun 2025, PIC IRH telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 – 20 Juni 2025. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra kemudian melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ke Provinsi Banten pada tanggal 15-17 Mei 2025.

Selanjutnya, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan:

- Penyusunan 1 (satu) Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- Penyusunan 1 (satu) Dokumen Daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi;
- Penyusunan 7 (tujuh) Dokumen Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Pengiriman 1 (satu) Dokumen Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke AKD;

Pada saat bersamaan, Biro Hukum telah melaksanakan pengumpulan 1 (satu) dokumen terkait kebijakan pengelolaan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP), serta penyusunan 1 (satu) dokumen Laporan Kegiatan *Benchmarking*. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana aksi IRH Triwulan II telah sepenuhnya terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rG7ZKGoeWCRC7qN>

**11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
ANRI	98,09	98,09	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Pemeliharaan Kaset	Terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 199.800.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Terpeliharanya Arsip CD/DVD	1	-	-	-	Rp. 175.158.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>	Terpeliharanya <i>Mobile File</i>	1	-	-	-	Rp. 140.415.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Cacah	Terpeliharanya Mesin Cacah	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Lemari Kaset	Terpeliharanya Lemari Penyimpanan Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 89.910.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Satu	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Dua	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Tiga	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 226.229.000	Telah terlaksana
<i>Workshop/Bimtek/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)</i>	Terselenggaranya kegiatan <i>Workshop/Bimtek/Seminar/FGD</i>	2	1	2	1	Rp. 112.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penataan Arsip Persidangan	Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Tertatanya Arsip Bidang Administrasi	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Tertatanya Arsip Bidang Keuangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Tertatanya Arsip Bidang Kepegawaian	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Barang/Jasa	Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Komisi	Tertatanya Kaset Rekam Suara Komisi	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Badan	Tertatanya Kaset Rekam Suara Badan	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Legislasi	Tertatanya Kaset Rekam Suara Legislasi	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Mini DV	Tertatanya Kaset Mini DV	1	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Persidangan Satu	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Panja	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Fit dan <i>Proper Test</i>	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Belum terlaksana
Digitalisasi Mini DV	Kaset Pita menjadi MP4	-	1	-	-	Rp. 192.500.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Arsip Kepegawaian	Arsip Konvensional kertas menjadi	1	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	pdf						

Selama periode Triwulan II, Bagian Arsip telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka mencapai target Indeks Digitalisasi Arsip, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sewa Ruang Penyimpanan Arsip Boks Arsip

Kegiatan Sewa Ruang Penyimpanan dilaksanakan, dikarenakan kapasitas *Record Center* yang dimiliki oleh Bagian Arsip tidak dapat menampung arsip seluruhnya, sehingga diperlukan penambahan Ruang penyimpanan arsip. Adapun hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya arsip yang telah dipindahkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Bagian Arsip untuk kemudian dilakukan pengelolaan arsip dan perawatan arsip, agar arsip tetap terjaga baik fisik dan informasinya. Pada Triwulan II, Bagian Arsip melaksanakan tiga kegiatan Sewa Ruang Penyimpanan. Dengan demikian, rencana aksi Sewa Ruang Arsip Satu, Sewa Ruang Arsip Dua, dan Sewa Ruang Arsip Tiga telah terlaksana.

2. Digitalisasi Arsip

Kegiatan Digitalisasi Arsip dilakukan terhadap arsip-arsip yang memiliki hasil akhir permanen dan memiliki nilai guna, salah satu contoh arsip yang dapat dilakukan digitalisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip DPR adalah Arsip Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (Arsip Legislasi) dan Arsip Personal File Anggota DPR. Digitalisasi Arsip dilakukan dengan tujuan untuk menjaga informasi arsip, serta memudahkan dalam melakukan pelayanan informasi. Dengan dilakukan digitalisasi arsip, maka layanan informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pada Triwulan II, Digitalisasi Arsip berfokus pada:

- Digitalisasi Kaset Persidangan Satu yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 25 April 2025;
- Digitalisasi Kaset Panja yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret s.d. 10 April 2025;
- Digitalisasi Kaset Fit dan *Proper Test*; dan
- Digitalisasi Mini DV yang dilaksanakan pada tanggal 21 April s.d. 19 Mei 2025.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM Kearsipan di Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap Pengelolaan Arsip. Peningkatan Kapasitas SDM ini dilakukan melalui sub kegiatan Pembinaan Kearsipan, Sosialisasi, *Workshop*, Bimbingan Teknis, Bimbingan Konseling, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Fokus peningkatan kapasitas SDM pada Triwulan II adalah Pegawai pada Unit Pengolah terutama dalam pemahaman penggunaan aplikasi SRIKANDI. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM ini, telah dilaksanakan 5 (lima) sesi, dimana pada setiap sesi, Bagian Arsip mengundang Narasumber yang berkompetensi dalam aplikasi SRIKANDI.

Sedangkan rencana aksi Digitalisasi Kaset Fit dan *Proper Test* belum terlaksana sebagaimana tidak ada data dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dfRwsAzpWCNyr6>

## 12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Indeks Pembangunan Statistik

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Badan Pusat Statistik	2,57	2,6	Pusat Teknologi Informasi

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Melakukan Reviu dan Evaluasi Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	Laporan Reviu dan Evaluasi Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	1	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan Reviu dan Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Satu Data DPR RI	Laporan Reviu dan Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Satu Data DPR RI	1	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan Dokumen Pemetaan dan Relevansi Data	Dokumen Pemetaan dan Relevansi Data	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Publikasi Data Statistik Sektoral di Portal Satu Data DPR RI	Data Statistik di Portal Satu Data DPR RI	2	-	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Surat Rekomendasi dari BPS terkait kegiatan statistik yang akan dinilai	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada indikator kegiatan Indeks Pembangunan Statistik, pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan pada Triwulan I, III, dan IV. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan II.

### 13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
LKPP	75,5	80	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku PBJ	Kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala, dan forum koordinasi konsultasi dengan mitra	3	3	3	3	Rp. 271.600.000	Telah terlaksana
Penerbitan dokumen pendukung tercapainya skor dari indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Surat Klarifikasi Pagu Pengadaan, Surat Pemberitahuan Penginputan SiRUP dan SPSE	3	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pencapaian skor untuk 6 indikator turunan dari Indikator pemanfaatan sistem	Tercapainya target skor untuk 6 indikator dengan <i>cut-off</i> data yang berbeda	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembaharuan rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ pada Aplikasi SIRENAKSI LKPP	Pembaharuan rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ	1	1	-	1	Rp. 70.815.000	Telah terlaksana
Pemenuhan SDM JF PPBJ dari pengangkatan pertama	Pelantikan CPNS 2025 untuk posisi JF PPBJ Ahli Pertama	-	1	-	-	Rp. 29.700.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi	Pelantikan kenaikan jenjang (promosi) JF PPBJ Ahli Pertama menjadi JF PPBJ Ahli Muda sebelum 31 Oktober 2025	-	-	1	-	Rp. 252.700.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain	Terlaksananya pelantikan perpindahan JF Lainnya Ahli Muda menjadi JF PPBJ Ahli Muda sebelum 31 Oktober 2025	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pemenuhan persyaratan pengajuan penetapan PKP – BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR RI	Dokumen atau Verifikasi terpenuhinya persyaratan pengajuan penetapan PKP - BJ Proaktif (5 indikator)	-	-	5	-	Rp. 263.250.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pengajuan penetapan PKP - BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR RI	Surat Pengajuan Penetapan PKP- BJ Proaktif	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Rencana aksi optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku PBJ, penerbitan dokumen pendukung tercapainya skor dari indikator pemanfaatan sistem pengadaan, dan pembaharuan rencana aksi pemenuhan SDM Pengelola PBJ pada Aplikasi SIRENAKSI LKPP telah terlaksana melalui serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan.

Kemudian, rencana aksi pemenuhan SDM Jabatan Fungsional PPBJ dari pengangkatan pertama juga telah terlaksana bersamaan dengan pelantikan CPNS Tahun 2025 untuk posisi Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Pertama, sehingga telah didapatkan dokumen Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pengangkatan CPNS dimaksud pada Triwulan II, dengan catatan pelaksanaan pelantikan di bulan April tahun 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Pqk4DWNkFawJzEP>

**14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:**  
**a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	90,24	96	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Sosialisasi dan Pengembangan Aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sosialisasi IKPA kepada Unit Kerja dan Pengembangan Modul IKPA di Aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 753.397.120	Telah terlaksana
Evaluasi Nilai IKPA Satker Setjen dan Dewan	Laporan Evaluasi Nilai IKPA Satker Setjen dan Satker Dewan	-	-	1	1	Rp. 1.450.794.240	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
Revisi Kewenangan KPA	Dokumen Laporan Revisi Kewenangan KPA	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Revisi Kewenangan Kanwil/DJA	Dokumen Laporan Revisi Kewenangan Kanwil/DJA	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemutakhiran RPD per Triwulan	Laporan Pemutakhiran RPD	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengelolaan Penyerapan Anggaran	Laporan Penyerapan Anggaran	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengelolaan Penyelesaian Tagihan	Laporan Penyelesaian Tagihan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pengelolaan Capaian Output	Laporan Capaian Output	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi Revisi Kewenangan KPA dan Revisi Kewenangan Kanwil/DJA telah dilaksanakan melalui rekapitulasi tiap bulan yang kemudian di *input* ke dalam Aplikasi DigitAll Modul IKPA oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Administrasi Keuangan. Selanjutnya, rencana aksi Pemutakhiran RPD per Triwulan telah terlaksana melalui terbitnya Surat Permohonan *Updating* Data RPD pada Aplikasi Digitall Keuangan Nomor B/823/KU.02/6/2025 tanggal 23 Juni 2025. Selain itu, Biro Keuangan telah menyediakan Tim *Liaison Officer* (LO) terkait IKPA yang mendampingi Unit kerja dalam pengisian RPD dan Pengelolaan Anggaran di masing-masing Unit Kerja.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi Pengelolaan Penyerapan Anggaran, Pengelolaan Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan Capaian Output juga telah terlaksana. Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi bekerja sama untuk mengelola IKPA terkait Indikator Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan Capaian Output berupa koordinasi bersama unit kerja secara rutin. Di samping itu, koordinasi bersama KPPN Jakarta VII dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam rangka sinkronisasi data dari Aplikasi Eksternal (SAKTI) ke Aplikasi Internal (Modul IKPA) juga dilakukan.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa rencana aksi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Triwulan II telah terlaksana sepenuhnya.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8Rwr6gmozoPwKLF>

#### b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	3,9	3,9	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK LKPP BMN	Kegiatan Rekonsiliasi dengan Unit Kerja pemilik	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	temuan dan Kementerian Keuangan						
Monitoring Capaian Realisasi PNPB yang berasal dari Pengelolaan BMN	Kegiatan Rekonsiliasi PNPB	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyampaian Laporan kepada Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan RKBMN T+2;</li> <li>Laporan Barang Pengguna;</li> <li>Laporan Pengawasan dan Pengendalian</li> </ul>	3	-	2	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengajuan asuransi untuk objek BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019	Dokumen Polis asuransi terhadap BMN di DPR RI	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Monitoring terhadap Persetujuan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Internal antara Tindak Lanjut Pengelolaan BMN dengan Aplikasi SIMANv2	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Monitoring : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghapusan BMN Rusak Berat;</li> <li>Penetapan Status Penggunaan;</li> <li>SBSK Gedung dan Bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kegiatan Penghapusan BMN Rusak Berat;</li> <li>Laporan Usulan PSP;</li> <li>Laporan Pengajuan SBSK</li> </ul>	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Peningkatan Kapasitas SDM	Laporan Kegiatan Bimtek/Workshop/Paket Meeting terkait Pengelolaan BMN	2	-	-	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi monitoring capaian realisasi PNBPN yang berasal dari pengelolaan BMN telah terlaksana setiap bulannya antara Biro Keuangan dengan DJA, serta antara Biro Keuangan dengan Bagian Wisma sebagai pelaksana pemanfaatan sewa. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan aset, seperti sewa BMN, kerja sama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), penjualan aset yang tidak dipakai (non-produktif), dan penetapan status penggunaan untuk disewakan atau dimanfaatkan secara ekonomi.

Selanjutnya, rencana aksi monitoring terhadap persetujuan dan tindak lanjut pengelolaan BMN telah dilakukan dengan aplikasi SIMAN untuk memastikan bahwa seluruh persetujuan telah ditindaklanjuti. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap:

- Permohonan persetujuan pengelolaan BMN (misalnya hibah, pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan);
- Tindak lanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (DJKN);
- Ketepatan pelaksanaan sesuai ketentuan dan *output* yang direncanakan.

Kemudian, rencana aksi monitoring penghapusan barang rusak berat, penetapan status penggunaan dan standar barang standar kebutuhan juga telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari proses administrasi yang diperlukan dalam pengelolaan BMN.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yzjAsf5rtMb2Xr9>

c. Opini BPK

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
BPK	WTP	WTP	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penagihan TLHP BPK	Kegiatan Penagihan TLHP BPK	2	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal	Laporan Keuangan dengan tepat waktu	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal	Laporan Keuangan dengan tepat waktu	1	1	1	1	Rp. 600.000.000	Telah terlaksana
Pengembangan Aplikasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Pengembangan Aplikasi PIPK	-	-	-	1	Rp. 200.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Sosialisasi Penyusunan <i>Risk Register</i> Tabel A PIPK	Sosialisasi Penyusunan <i>Risk Register</i> Tabel A PIPK	1	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal telah dilaksanakan antara satuan kerja dan Kementerian Keuangan (KPPN dan DJPb), yang mencakup saldo kas, realisasi belanja, dan akun-akun neraca lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik melalui aplikasi Monsakti, dengan pelibatan langsung Tim Pelaporan dan Bendahara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung keterpaduan dan konsistensi data antar instansi, serta mencegah perbedaan saldo yang dapat berdampak pada opini BPK.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/9XWQkkcSeJc9ZMQ>

**d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
BPK	88,24%	95%	Inspektorat Utama

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>Target Penyelesaian</b>				<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Penjelasan Capaian</b>
		<b>TW 1</b>	<b>TW 2</b>	<b>TW 3</b>	<b>TW 4</b>		
Melakukan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Penyusunan Tim Penyelesaian Kerugian Negara	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Kegiatan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	Rp. 50.050.000	Telah terlaksana

Rencana aksi Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui Rapat Koordinasi pada tanggal 15 s.d. 22 April 2025. Rapat ini mengundang Unit Kerja yang masih memiliki temuan yaitu Biro Keuangan dengan 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi yang belum selesai, Biro Umum dengan 9 (sembilan) rekomendasi yang belum selesai, serta Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dengan 17 (tujuh belas) rekomendasi, untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK dengan menyampaikan data dukung pada tautan yang disediakan.

Sebagai rangkaian dari kegiatan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Rapat Koordinasi lainnya dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2025. Rapat ini mengundang Unit Kerja yang masih memiliki temuan yaitu Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Persidangan I dan II, untuk segera menyelesaikan Rekomendasi BPK dengan menyampaikan data dukung pada *link* yang disediakan, paling lambat tanggal 4 Juli 2024, dikarenakan Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional akan melaksanakan *Entry Meeting* Pemantauan TLHP BPK Semester I 2025 pada tanggal 30 Juni 2025.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, seperti komitmen yang kuat dari Pimpinan, sinergi dan koordinasi yang baik antara Unit Kerja dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama, serta pemantauan tindak lanjut yang intensif, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, sesungguhnya keberhasilan dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bukan pada terlaksananya kegiatan rencana aksi, namun diukur dari tingginya persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai (status 1), kecepatan pelaksanaan tindak lanjut,

besarnya nilai pengembalian negara apabila terdapat temuan yang berdampak finansial serta adanya perbaikan signifikan dalam sistem pengendalian internal agar tidak terjadi temuan berulang.

Sampai saat ini, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II 2024 belum terbit dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perpindahan lingkup pemeriksaan entitas, dimana Sekretariat Jenderal DPR RI yang awalnya merupakan lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) III menjadi lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VIII dan Organisasi Internasional. Sehingga Kementerian PANRB mengeluarkan data persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 88,24% dikarenakan Kementerian PANRB hanya menghitung data tindak lanjut yang sesuai sampai Semester I 2024, sedangkan yang sesuai di Semester II 2024 tidak dihitung dan dianggap sama sekali tidak ditindaklanjuti, hal ini terjadi karena BPK RI belum menerbitkan Laporan Pemantauan Semester II 2024.

Jika didasarkan pada hasil Rapat *Exit Meeting* Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024 dengan Tim Pemantauan BPK RI, maka nilai persentase yang dicapai seharusnya sebesar 93,21 % dengan jumlah kerugian negara yang belum dikembalikan ke negara sebesar Rp2.823.532.035,00 dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 45 (empat puluh lima) rekomendasi.

Kedepannya, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap 45 (empat puluh lima) rekomendasi yang tersisa menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Utama sebagai koordinator antara lain terdapat pemahaman yang kurang mendalam di Unit Kerja terhadap substansi rekomendasi, pergantian pejabat yang menyebabkan terputusnya informasi, rekomendasi yang membutuhkan koordinasi lintas instansi yang membutuhkan penganggaran khusus serta banyaknya temuan – temuan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dimana perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat sudah tidak dapat ditelusuri.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/NLrEeaxrmAK2HEe>

## 15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
KASN	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyempurnaan Sisten dan Fitur SIMATA	Dokumen Penyempurnaan	-	1	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	dan Penambahan Fitur SIMATA						
Sosialisasi SIMATA	Sosialisasi SIMATA	-	1	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Membuat Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	Pedoman Pengelolaan Kinerja	-	1	-	-	Rp. 5.670.000	Belum terlaksana
Melakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	-	1	-	-	Rp. 145.000.000	Belum terlaksana
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu	Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu	-	1	-	-	Rp. 5.670.000	Belum terlaksana
Pembaharuan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 145.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi Indikator Sistem Merit pada Triwulan II yang meliputi Penyempurnaan Sisten dan Fitur SIMATA, Sosialisasi SIMATA, Membuat Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu, Melakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu, dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu belum terlaksana sebagaimana tidak ada Laporan Progres dan data dukung yang disertakan. Berdasarkan hasil evaluasi atas progress kegiatan yang telah dilaksanakan di Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, telah disepakati untuk dilakukan perubahan *timeline* target penyelesaian untuk seluruh kegiatan di dalam indikator Indeks Sistem Merit menjadi ke Triwulan IV.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qHEcEg3qecxiyTr>

## 16. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,23%	77,23%	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyelenggaraan kuis BerAKHLAK di Portal Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 20.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pemberian Penghargaan Pemenang Kuis BerAKHLAK	Laporan Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 8.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Internalisasi BerAKHLAK melalui materi “ASN Profesional BerAKHLAK Mendukung/Menuju Parlemen Modern” pada agenda pengembangan kompetensi untuk pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusbangkom	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Materi pada Agenda Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	1	Rp. 36.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyelenggaraan Seminar dan/atau Webinar Series BerAKHLAK	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seminar dan/atau	-	-	-	1	Rp. 438.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Webinar Series BerAKHLAK						
Penyelenggaraan Podcast BerAKHLAK	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Podcast BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 84.600.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Sosialisasi Nilai BerAKHLAK melalui media cetak, digital dan sosial	Laporan Kegiatan Pemasangan Roll Baner BerAKHLAK di seluruh pintu Gedung DPR RI	-	-	1	-	Rp. 5.500.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Pada indikator Indeks BerAKHLAK, target penyelesaian rencana aksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan II.

#### 17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:

##### a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	93,45	93,45	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan Pedoman Survei di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang Terintegrasi	Tim Evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017						
	Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Implementasi Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi pada seluruh Unit Kerja Eselon II dan dibawahnya	Kuesioner, <i>link</i> , <i>barcode</i>	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi yang dapat di akses perkembangan oleh PIC Unit Kerja terkait	-	1	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Penguatan Penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan	Bimbingan teknis penyelenggaraan survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditetapkan sebagai Satuan Tugas Survei Kepuasan Masyarakat di setiap unit kerja	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI	-	1	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	-	1	1	1	Rp. 155.950.000	Telah terlaksana
Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan	Rekapitulasi data pengisian kuesioner	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat reguler sesuai kebutuhan	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV

Rencana Aksi	Indikator <i>Output</i>	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	pelaporan kepada Kementerian PANRB maupun irreguler sesuai permintaan unit kerja terkait						

Rencana aksi penetapan Pedoman Survei di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang Terintegrasi dengan indikator *output* Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 telah terlaksana dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 224/SEKJEN/2025 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 20 Januari 2025.

Kemudian rencana aksi implementasi Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi pada seluruh Unit Kerja Eselon II dan dibawahnya dengan indikator *output* kuesioner, *link*, *barcode* juga telah terlaksana. Kuesioner SKM dalam bentuk *barcode* dan *link* telah dibuat untuk masing-masing Unit Kerja Eselon II dan disebar kepada para pengguna layanan. Responden survei yang ikut berkontribusi dalam pengisian dan penilaian terdiri dari Anggota DPR RI, Mitra Kerja, Keluarga Anggota DPR RI, PNS Sekretariat Jenderal DPR RI, CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI, TSP, SA/TA/SAA, Mitra K/L, PNS di luar Kesetjengan DPR RI, dan Masyarakat Umum. Dengan terlaksananya rencana aksi ini, maka rencana aksi penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan telah Terlaksana.

Selanjutnya, rencana aksi terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan dengan indikator *output* Rekapitulasi Data Pengisian Kuesioner dan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI telah terlaksana dengan tersedianya Laporan Survei masing-masing unit kerja Eselon II yang dapat diakses di Google Drive.

Rencana aksi penguatan penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan dengan indikator *output* Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei Di Seluruh Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditetapkan Satuan Tugas Survei Kepuasan Masyarakat di setiap unit kerja juga telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 secara *hybrid*. Bimbingan teknis diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman yang sama tentang urgensi penyelenggaraan SKM dalam rangka mewujudkan komitmen seluruh Unit Kerja di Kesetjengan DPR RI untuk senantiasa meningkatkan kinerja melalui evaluasi layanan yang dilakukan secara berkala. Bersamaan dengan itu, telah terbentuk pula forum komunikasi antarkoordinator melalui *platform* Grup WhatsApp untuk memudahkan kegiatan koordinasi. Namun, indikator *output* Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat

terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI pada rencana aksi yang sama belum terlaksana sebagaimana tidak ada data dukung yang disertakan.

Di samping itu, rencana aksi Penguatan Penyelenggaraan Survei dengan indikator *output* Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi yang dapat diakses perkembangan oleh PIC Unit Kerja terkait juga belum terlaksana sebagaimana tidak ada data dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/j6DQtzN8wy9eSPj>

#### b. Indeks Pelayanan Publik

<b>Leading Sector</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target 2025</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Kementerian PANRB	4,74	4,74	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penentuan Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional	Laporan Penetapan ULE dan Jadwal PEKPPP Mandiri Instansional	1	-	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	Dokumen Surat Tugas/Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	1	-	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2025	Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi	Laporan Pelaksanaan	-	1	1	-	Rp. 21.875.000	Telah terlaksana

Pelayanan Publik Lingkup Internal Sekretariat Jenderal DPR RI	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Internal						
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional oleh Kementerian PANRB	Laporan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Nasional	-	1	-	-	Rp. 19.000.000	Telah terlaksana
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap ULE	Laporan SKM Per Semester	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Intansional	Laporan PEKPPP Mandiri Intansional	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	Berita Acara Pelaksanaan Forum Konsultasi Puiblik	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari Hasil FKP dan SKM	Dokumen Rencana Tindak Lanjut	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan RTL	Capaian Realisasi Pelaksanaan RTL	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mal Pelayanan Publik Online ( <i>One Stop Information Service</i> )	Dokumen Pengembangan Aplikasi MPP Online	-	-	-	1	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional oleh Kementerian PANRB telah terlaksana. Inovasi yang diusulkan merupakan inovasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang KIPP Internal Sekretariat Jenderal DPR RI pada Semester I Tahun 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1549/SEKJEN 2024 tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 Semester I. Adapun 2 (dua) inovasi yang diusulkan, yaitu Aplikasi Perjalanan Dinas (ALADIN) yang dikelola oleh Biro Keuangan, dan Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI) yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pelaksanaan pendampingan terhadap penyusunan proposal dan pembuatan video inovasi dilakukan oleh PIC IPP, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Kementerian PANRB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga. Penyampaian proposal beserta video inovasi sebagai bagian dan persyaratan administrasi telah dilaksanakan pada akhir Triwulan II Tahun 2025 melalui akun resmi laman <https://sinovik.menpan.go.id>.

Dari 2 (dua) inoasi yang diajukan, terdapat satu inovasi, yaitu ALADIN yang memerlukan proses sanggah dokumen. Setelah proses sanggah dilakukan, kedua inovasi tersebut dinyatakan lolos seleksi administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Kementerian PANRB, sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/185/PP.00.05/2025 tanggal 26 Juni 2025. Adapun tahap selanjutnya adalah penilaian inovasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB untuk menentukan inovasi yang masuk ke dalam Tahap Uji Publik, Penilaian Inovasi oleh Masyarakat, dan Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik yang akan berlangsung di Triwulan III.

Kemudian, rencana aksi pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Internal Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah terlaksana. Berdasarkan tahapan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1298/SEKJEN/2025 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sejumlah tahapan awal telah diselesaikan hingga akhir Triwulan II. Tahapan tersebut mencakup Kegiatan Sosialisasi, Pengajuan Proposal Inovasi oleh UPP, serta Verifikasi Administrasi. Sebanyak 13 (tiga belas) UPP telah mengajukan proposal inovasi, masing-masing mewakili Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan proposal inovasi yang telah diterima, telah dilaksanakan penilaian proposal dan telah terpilih 5 (lima) inovasi yang lolos ke tahap berikutnya, diantaranya yaitu:

- a) SITANGGUH oleh Biro Keuangan;
- b) SIRIH (Sistem Informasi Risalah) oleh Biro Persidangan I;
- c) CUP DATE (*Constitutional Update*) oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- d) PPID DPR RI oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat;
- e) *Regulatory Sandbox* oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM.

Inovasi di atas akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu Penilaian Observasi dan Video Inovasi, serta penetapan pemenang yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025.

Untuk rencana aksi Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2025 telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025. Persiapan tersebut meliputi Penetapan Tim Pendamping dan Evaluator Internal yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1703/SEKJEN/2025. Sementara itu, tahapan pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional secara substantif direncanakan akan dimulai pada Triwulan III, mencakup proses penyiapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), pendampingan UPP dalam pengisian LKE, serta penyusunan laporan pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional.

Selanjutnya, rencana aksi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap ULE telah dilaksanakan secara terpusat oleh Pusat Analisis Keparlemenan, termasuk bagi unit layanan yang akan direncanakan menjadi objek evaluasi IPP. Meskipun, hingga saat ini Unit Lokus

Evaluasi (ULE) belum ditetapkan secara resmi, pelaksanaan SKM terhadap seluruh unit kerja telah dilakukan.

Bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi di Triwulan II, telah dilaksanakan juga beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Online (*One Stop Information Service*) berupa penguatan regulasi internal, diantaranya:

- Pemetaan Unit Pelayanan Publik (UPP) yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik secara langsung kepada Masyarakat; dan
- Penyusunan draft Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi MPP Online yang sedang dalam proses.

Sementara itu, realisasi anggaran yang terserap pada kegiatan KIPP Internal sejumlah Rp. 18.630.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 21.875.000,- atau penyerapan sebesar 85%. Optimalisasi penyerapan anggaran akan terlaksana pada Triwulan III dan IV sesuai dengan tahapan kegiatan KIPP Internal Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan realiasi anggaran yang terserap pada kegiatan KIPP Nasional sejumlah Rp. 19.065.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- atau penyerapan lebih dari 100%.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/E8w4A9iK4FjHw4R>

## LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN II TAHUN 2025

### SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 setelah dilakukan penajaman dan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. RB Tematik pada dasarnya merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas Pembangunan Nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sasaran pelaksanaan RB Tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun pada dasarnya, RB Tematik dituangkan ke dalam lima tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, DPR RI memiliki intervensi yang penting untuk lima tema RB Tematik, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Investasi, Peningkatan Digitalisasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan, dan Peningkatan Produk Dalam Negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan sebagai sistem pendukung DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam lima tema RB diharapkan akan tercapai.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan II Tahun 2025.

#### A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN II TAHUN 2025

##### 1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di sektor ketahanan pangan, dilakukan peningkatan terhadap dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi melalui pengelolaan serta pemanfaatan data hasil kajian secara optimal. Upaya ini ditunjang oleh pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, guna memastikan bahwa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memiliki akses cepat terhadap informasi yang akurat, terkonsolidasi, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi pengawasan

dan legislasi.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan utilisasi sistem dukungan keahlian, persidangan dan administrasi yang terpadu dalam penyediaan informasi hasil pembahasan dan kajian penanggulangan kemiskinan yang terkait ketahanan pangan untuk mendukung AKD dalam merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan oleh mitra kerja.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah unit AKD yang mengakses berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *repository digital* dukungan Bidang Ketahanan Pangan dengan target 4 (empat) AKD yang mengakses; dan
2. Pelaksanaan survei identifikasi pengetahuan dan penggunaan hasil kajian oleh Anggota DPR dengan target terlaksananya survei kepada Anggota DPR RI.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Penyusunan Tim Penguatan Analisis tentang Ketahanan Pangan	Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Belum terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan <i>Repository Digital</i>	Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 0	Perencanaan	Belum terlaksana
Diskusi dengan Pakar terkait Ketahanan Pangan	Laporan Diskusi	-	1	-	-	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Inventarisasi Dokumen dan/atau Kajian terkait Ketahanan Pangan	Hasil Kajian dan Analisis	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Ketahanan Pangan	Tim	-	1	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan NA dan Draft RUU	NA dan Draft RUU	-	-	-	1	Rp. 0	Lain-lain	Rencana Aksi akan

tentang Ketahanan Pangan								dilaksanakan pada Triwulan IV
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i> tentang Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pengembangan Kuesioner dan Instrumen Survei	Kuesioner	-	-	1	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan Survei	Survei	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Evaluasi Hasil Survei	Laporan	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi diskusi dengan pakar terkait ketahanan pangan telah terlaksana pada tanggal 15 s.d. 21 Januari 2025 dengan berbagai narasumber dari berbagai instansi seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BULOG, Fakultas Pertanian IPB, Fakultas Hukum UI, dan LSM.

Selanjutnya, rencana aksi input data dan dokumen secara berkala pada *repository digital* tentang ketahanan pangan juga telah terlaksana. *Repository Digital* aplikasi SIMFONI juga telah terintegrasi dengan Nusantara SuperApp yang merupakan aplikasi terintegrasi dari berbagai *platform* dalam memberikan dukungan layanan optimal kepada Anggota DPR RI.

Kemudian, rencana aksi inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait ketahanan pangan telah dilaksanakan melalui terbitnya berbagai Isu Sepekan, Info Singkat, serta *Policy Brief* terkait ketahanan pangan. Begitu pula dengan rencana aksi pembentukan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Ketahanan Pangan juga telah terlaksana.

Namun, rencana aksi Penyusunan Tim Penguatan Analisis tentang Ketahanan Pangan dan Penyusunan SOP pada pengelolaan *Repository Digital* yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan I masih belum terlaksana hingga Triwulan II sebagaimana tidak ada data dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/PxKGYdPrWJ3AHXQ>

## 2. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi diperlukan peningkatan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian berupa penyediaan data, informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi untuk menunjang fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada sektor finansial dan sektor riil, dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi terkait peningkatan investasi pada sektor finansial dan sektor riil, dari dalam maupun luar negeri.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah AKD yang memanfaatkan berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *Repository Digital* dukungan Bidang Peningkatan Investasi dengan target 4 (empat) AKD; dan
2. Terlaksananya Survei Kepuasan dengan target Indeks Kepuasan “3” (skala 0-5).

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola <i>Repository Digital</i>	Surat Tugas Tim Pengelola <i>Repository Digital</i>	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan <i>Repository Digital</i>	Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 0	Perencanaan	Belum terlaksana
Penyesuaian Teknis Sistem <i>Repository Digital</i>	Sistem	-	1	-	-	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana

sesuai SOP								
Inventarisasi dokumen dan/atau Kajian terkait Peningkatan Investasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i> terkait Peningkatan Investasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Pengawas an	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan <i>Repository Digital</i>	Survei	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi penyesuaian teknis pada sistem *Repository Digital* sesuai SOP dan rencana aksi input data dan dokumen secara berkala pada *Repository Digital* terkait Peningkatan Investasi telah terlaksana. *Repository Digital* aplikasi SIMFONI juga telah terintegrasi dengan Nusantara SuperApp yang merupakan aplikasi terintegrasi dari berbagai *platform* dalam memberikan dukungan layanan optimal kepada Anggota DPR RI. Bersamaan dengan itu, rencana aksi inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait peningkatan investasi juga telah dilaksanakan. Namun, rencana aksi Penyusunan SOP pada pengelolaan *Repository Digital* yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan I masih belum terlaksana sebagaimana tidak ada bukti dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/wR4z86bzQC9GWcL>

### 3. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi diperlukan peningkatan dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi dalam pengelolaan serta penyimpanan data terintegrasi hasil pembahasan dan kajian terkait pengendalian inflasi, sehingga meningkatkan akses AKD terhadap informasi yang akurat dan terkonsolidasi untuk merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi oleh mitra kerja.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan dokumen kajian dan informasi terkait pengendalian inflasi untuk mendukung

AKD dalam merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan inflasi oleh mitra kerja.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah AKD yang memanfaatkan berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *Repository Digital* dukungan Bidang Pengendalian Inflasi dengan target 4 (empat) AKD; dan
2. Terlaksananya Survei Kepuasan dengan target Indeks Kepuasan “3” (skala 0-5).

Capaian sasaran dan indikator tema Pengendalian Inflasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola <i>Repository Digital</i>	SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada Pengelolaan <i>Repository Digital</i>	Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 0	Perencanaan	Belum terlaksana
Penyesuaian sistem <i>Repository Digital</i>	Sistem	-	1	-	-	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Inventarisasi dokumen dan/atau Kajian terkait Pengendalian Inflasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i> terkait Pengendalian Inflasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan <i>Repository Digital</i>	Survei	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan

Rencana aksi penyesuaian sistem *Repository Digital* dan rencana aksi input data dan dokumen secara berkala pada *Repository Digital* terkait Pengendalian Inflasi telah terlaksana. *Repository Digital* aplikasi SIMFONI pun telah terintegrasi dengan Nusantara SuperApp yang merupakan aplikasi terintegrasi dari berbagai *platform* dalam memberikan dukungan layanan optimal kepada Anggota DPR RI. Bersamaan dengan itu, rencana aksi inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait Pengendalian Inflasi juga telah dilaksanakan.

Namun, rencana aksi Penyusunan SOP pada pengelolaan *Repository Digital* yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan I masih belum terlaksana sebagaimana tidak ada bukti dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Sm8owtx9nBpoPSF>

#### 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mendukung upaya digitalisasi administrasi pemerintah, dilakukan peningkatan terhadap dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi melalui pengembangan dan pengelolaan aplikasi digitalisasi administrasi pemerintah, serta pemanfaatan data hasil kajian secara optimal. Upaya ini ditunjang oleh pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, guna memastikan bahwa AKD memiliki akses cepat terhadap informasi yang akurat, terkonsolidasi, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi. Disamping itu, dalam rangka mendukung upaya digitalisasi administrasi pemerintah, dilakukan peningkatan terhadap dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi melalui pengembangan aplikasi digitalisasi.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan utilisasi sistem dukungan keahlian, persidangan dan administrasi yang terpadu dalam penyediaan dan informasi hasil pembahasan dan kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintah untuk mendukung AKD dalam merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan digitalisasi administrasi pemerintah oleh mitra kerja. Disamping itu, sasaran lainnya adalah tersedianya aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah unit AKD yang mengakses berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *Repository Digital* dukungan Bidang Digitalisasi Administrasi pemerintah dengan target 4 (empat) AKD yang mengakses; dan
2. Jumlah aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah dengan target 1 (satu) aplikasi.

Capaian sasaran dan indikator tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Hasil Kajian dan Analisis	2	2	1	1	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i> tentang Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen	-	2	1	1	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Pemanfaatan Sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Persiapan dan penyusunan untuk mengembangkan aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Dokumentasi	1	-	-	-	Rp.0	Inovasi	Telah terlaksana
Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Dokumentasi	-	1	-	-	Rp.0	Inovasi	Telah terlaksana
Monitoring Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Dokumentasi	-	-	1	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Evaluasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Dokumentasi dan Laporan	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah dan rencana aksi input data dan dokumen secara berkala pada *Repository Digital* tentang Digitalisasi Administrasi Pemerintah telah terlaksana. *Repository Digital* aplikasi SIMFONI pun telah terintegrasi dengan Nusantara SuperApp yang merupakan aplikasi terintegrasi dari berbagai *platform* dalam memberikan dukungan layanan optimal kepada Anggota DPR RI.

Kemudian, rencana aksi persiapan dan penyusunan untuk mengembangkan aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah yang sebelumnya ditargetkan di Triwulan I telah terlaksana di Triwulan II. Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah tersebut juga telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI.



Gambar 1.5 Sosialisasi Aplikasi Nusantara

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/cg3a54C8EcFsJZy>

## 5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase realisasi transaksi belanja PDN pada 2024 berada di atas 40% dan mengalami peningkatan dibanding 2023, dari 67,64% menjadi 74,97%. Namun, pencapaian tersebut masih di bawah realisasi nasional yang mencapai 90,08%. Selain itu, capaian persentase realisasi transaksi belanja PDN pada akhir 2024 masih di bawah Alokasi PDN dalam RUP sebesar 88,69%. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya Digitalisasi Administrasi Pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah terlaksananya penggunaan anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Indikator dari sasaran tersebut terlaksananya penggunaan anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Capaian sasaran dan indikator tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Surat Keputusan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi dan Penginputan RUP Tahun 2025	Laporan	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Triwulan I	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Semester I	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	40 %	-	-	Rp. 0	SDM	Telah dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2025	Laporan	-	-	1	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Triwulan III	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	40 %	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun 2025/Akhir Tahun	Laporan	-	-	-	1	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga akhir tahun 2025	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	40 %	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Semester I telah dilaksanakan secara berkala.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/bcqZYBPsbBjH34r>

## **LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Berdasarkan pemaparan dari Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB mengenai *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029, ditegaskan bahwa Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 merupakan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan Evaluasi RB Tahun 2025 dengan merujuk pada Laporan Hasil Evaluasi RB Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Aksi RB berjalan sesuai rencana serta telah mengakomodasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan masukan dalam mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan RB, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Evaluasi internal dilakukan dengan menelaah pelaksanaan rencana aksi secara berkelanjutan (*on-going*), guna memperoleh informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan terhadap tujuan yang telah disepakati, pencapaian *output* per triwulan, kualitas manajemen kegiatan, serta kesesuaian waktu pelaksanaan dengan yang tercantum dalam rencana aksi. Evaluasi ini juga mencakup pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi dari evaluasi sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi internal tidak hanya menilai ketercapaian *output* dan kualitas rencana aksi, tetapi juga melibatkan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) sebagai unit yang berperan dalam pengelolaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI. Evaluasi internal juga melakukan konfirmasi langsung kepada Unit Kerja Penanggung Jawab (PIC) guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan Evaluasi RB.

Sesuai dengan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh Inspektorat Utama melalui Surat Nomor: 545/PI.03/07/2024 pada tanggal 10 September 2025, Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RB dibandingkan dengan rencana aksi yang telah disusun terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ketercapaian target-target rencana aksi (satuan dan indikator *output*) sebagai berikut:
  - a) Seluruh pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah tercapai *output*-nya pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
    - ii. Indeks Pengelolaan Aset;
    - iii. Opini BPK;
    - iv. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO);
    - v. Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
    - vi. Indeks SPBE;

- vii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- viii. Indeks Perencanaan Pembangunan.

b) Sebagian pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah tercapai *output*-nya pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

- i. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- ii. Tingkat Maturitas SPIP;
- iii. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
- iv. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang Terintegrasi;
- v. Survei Penilaian Integritas (SPI);
- vi. Indeks Digitalisasi Arsip;
- vii. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- viii. Tindak Keberhasilan Pembangunan ZI;
- ix. Indeks Reformasi Hukum;
- x. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP.

c) Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah tercapai *output*-nya pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

- i. Indeks Pelayanan Publik;
- ii. Indeks Sistem Merit.

2) Ketercapaian target-target rencana aksi (waktu) sebagai berikut:

a) Seluruh pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

- i. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- ii. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO);
- iii. Indeks SPBE;
- iv. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
- v. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;
- vi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- vii. Indeks Perencanaan Pembangunan;
- viii. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- ix. Indeks Pengelolaan Aset;
- x. Opini BPK.

b) Sebagian besar pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

- i. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- ii. Skor Maturitas SPIP;
- iii. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang Terintegrasi;
- iv. Survei Penilaian Integritas (SPI);
- v. Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip;

- vi. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP);
  - vii. Indeks Reformasi Hukum;
  - viii. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP.
- c) Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:
- i. Indeks Pelayanan Publik;
  - ii. Indeks Sistem Merit.
- 3) Kualitas kegiatan terhadap ekspektasi rencana aksi RB dan kualitas manajemen dalam pelaksanaan RB sebagai berikut:
- a) Seluruh pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai dengan indikator *output*, dengan rincian sebagai berikut:
- i. Indeks Pengelolaan Aset;
  - ii. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b) Sebagian pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai dengan indikator *output* dengan rincian sebagai berikut:
- i. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
  - ii. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO);
  - iii. Indeks SPBE;
  - iv. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - v. Skor Maturitas SPIP;
  - vi. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
  - vii. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang Terintegrasi;
  - viii. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
  - ix. Opini BPK;
  - x. Survei Penilaian Integritas (SPI);
  - xi. Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip;
  - xii. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP);
  - xiii. Indeks Perencanaan Pembangunan;
  - xiv. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;
  - xv. Indeks Reformasi Hukum;
  - xvi. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP.
- c) Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai dengan indikator *output* dengan rincian sebagai berikut:
- i. Indeks Pelayanan Publik;
  - ii. Indeks Sistem Merit.
- d) Pelaksanaan seluruh aksi di triwulan selanjutnya (tidak terdapat aksi di Triwulan II):
- i. Indeks BerAKHLAK.;

- ii. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Indeks Pembangunan Statistik).

4) Evaluasi RB *On-Going* Tematik Triwulan II

Terdapat 5 (lima) indikator utama dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) *On-Going* Tematik, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Pemerintahan, Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Hasil Evaluasi Internal menunjukkan bahwa Rencana Aksi 2025 belum memerhatikan Rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu Intervensi belum mencakup sebagian besaR (80-100%) dari keseluruhan rincian rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut:

- a) SOP;
- b) Teknologi Informasi;
- c) Inovasi.

Setiap aksi menunjukkan pencapaian target rencana aksi dan *output* sesuai waktu yang ditetapkan. Dari segi kualitas kegiatan terhadap ekspektasi Rencana Aksi RB, bukti dukung menunjukkan bahwa kegiatan telah menghasilkan *output* yang jelas dan selaras dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dari sisi kualitas manajemen pelaksanaan, bukti dukung yang disajikan relevan dengan pencapaian tujuan dan menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) *On-Going* Tematik telah berjalan sesuai harapan.

Secara keseluruhan, kelima aksi tersebut berhasil dilaksanakan sesuai target dan ekspektasi, baik dari segi kualitas kegiatan maupun manajemen pelaksanaannya di Triwulan II.

#### A. KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI (*OUTPUT* DAN WAKTU)

NO	AKSI	CATATAN ( <i>OUTPUT</i> )	CATATAN (WAKTU)
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II

	bagi Pegawai ASN		
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	<p>Terdapat 3 dari 6 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya di Triwulan II, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi;</li> <li>• Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal; dan</li> <li>• Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja.</li> </ul> <p>Selain itu, terdapat 2 dari 6 indikator <i>output</i> yang dihapus dalam rencana aksi tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Semester; dan</li> <li>• Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Kinerja Organisasi</li> </ul>	<p>Terdapat 3 dari 6 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya di Triwulan II, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi;</li> <li>• Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal; dan</li> <li>• Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja.</li> </ul> <p>Selain itu, terdapat 2 dari 6 indikator <i>output</i> yang dihapus dalam rencana aksi tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Semester; dan</li> <li>• Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Kinerja Organisasi</li> </ul>
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern	Terdapat 1 dari 3 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksi di Triwulan II, yaitu indikator "SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan	Terdapat 1 dari 3 indikator <i>output</i> yang dilaksanakan pada Triwulan II, yaitu indikator:

	Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi SPIP”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi SPIP”; dan</li> <li>• Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK</li> </ul>
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>Terdapat 2 dari 3 rencana aksi yang belum tercapai <i>output</i> aksi di Triwulan II, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Pendampingan Pembangunan Unit ZI menuju WBK/WBBM di lingkup tugas pengawasan Inspektorat II telah dilakukan namun belum menggambarkan adanya Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan Unit ZI Triwulan II; dan</li> <li>• Belum dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPI KPK pada Triwulan II</li> </ul>	<p>Terdapat 2 dari 3 rencana aksi yang belum menunjukkan ketepatan waktu pelaksanaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Pendampingan Pembangunan Unit ZI menuju WBK/WBBM di lingkup tugas pengawasan Inspektorat II telah dilakukan namun belum menggambarkan adanya Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan Unit ZI Triwulan II; dan</li> <li>• Belum dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPI KPK pada Triwulan II</li> </ul>
9.	Pelaksanaan Pembentukan	Terdapat 4 dari 11 indikator <i>output</i> yang belum tercapai	Terdapat 4 dari 11 indikator <i>output</i> yang belum tercapai

	Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	<p><i>output</i> aksinya di Triwulan II, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen terkait kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP);</li> <li>• Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>;</li> <li>• Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI; dan</li> <li>• <i>Screenshot</i> bukti <i>upload</i> di media sosial</li> </ul>	<p><i>output</i> aksinya di Triwulan II, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen terkait kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP);</li> <li>• Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>;</li> <li>• Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI; dan</li> <li>• <i>Screenshot</i> bukti <i>upload</i> di media sosial</li> </ul>
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Terdapat 1 dari 8 rencana aksi yang belum tercapai <i>output</i> aksi di Triwulan II, yaitu belum terlampir data dukung berupa Laporan Kegiatan dan BAST kegiatan Digitalisasi Kaset <i>Fit</i> dan <i>Proper Test</i>	Terdapat 1 dari 8 rencana aksi yang belum menunjukkan ketepatan waktu dikarenakan belum terlampir data dukung berupa Laporan Kegiatan dan BAST kegiatan Digitalisasi Kaset <i>Fit</i> dan <i>Proper Test</i>
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terdapat 1 dari 3 rencana aksi yang belum tercapai <i>output</i> aksinya di Triwulan II, yaitu belum terlampir data dukung berupa dokumen pembaharuan rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ Triwulan II	Terdapat 1 dari 3 rencana aksi yang belum menunjukkan ketepatan waktu dikarenakan belum terlampir data dukung berupa dokumen pembaharuan rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ Triwulan II
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II

	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II
16.	Indeks Sistem Merit	Belum terdapat data dukung yang dilampirkan untuk setiap indikator yang ditargetkan pada Triwulan II	Belum terdapat data dukung yang dilampirkan untuk setiap indikator yang ditargetkan pada Triwulan II
17.	Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Terdapat 6 dari 8 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksi di Triwulan II	Terdapat 6 dari 8 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksi di Triwulan II
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>Seluruh rencana aksi Triwulan II belum tercapai <i>output</i> aksinya dikarenakan belum terlampir data dukung berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim;</li> <li>• Laporan Pelaksanaan Lomba Kompetisi Inovasi Internal;</li> <li>• Laporan Hasil SKM Per Semester;</li> <li>• Laporan FKP; dan</li> <li>• Progres Pengembangan Aplikasi Mall Pelayanan</li> </ul>	<p>Seluruh rencana aksi Triwulan II belum menunjukkan ketepatan waktu dikarenakan belum terlampir data dukung berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim;</li> <li>• Laporan Pelaksanaan Lomba Kompetisi Inovasi Internal;</li> <li>• Laporan Hasil SKM Per Semester;</li> <li>• Laporan FKP; dan</li> <li>• Progres Pengembangan Aplikasi</li> </ul>

		Publik Online ( <i>One Stop Information Service</i> )	Mall Pelayanan Publik Online ( <i>One Stop Information Service</i> )
21.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan II	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II

#### B. KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	<p>Indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berkualitas, yang belum menggambarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Target yang ditetapkan untuk setiap aspek penyederhanaan birokrasi;</li> <li>b) Kebijakan/Program Penyederhanaan Birokrasi: termasuk area fokusnya (misalnya, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, penyetaraan jabatan fungsional);</li> <li>c) Dalam saran, belum tergambar usulan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan efektivitas program selain dari penerapan pendekatan keleluasaan ke Kementerian PANRB;</li> <li>d) Belum dilampirkan dokumen pendukung (Kebijakan, Pedoman, Notulen Rapat terkait)</li> </ul>
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	<p>Indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berkualitas, yang belum menggambarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;</li> <li>b) Daftar SOP yang diperbaiki pasca penyederhanaan birokrasi (di Laporan Progres ada namun di Laporan Monitoring dan Evaluasi tidak ada); dan</li> <li>c) Belum dilampirkan dokumen pendukung (Kebijakan, Pedoman, Notulen rapat terkait)</li> </ul>
3.	Indeks SPBE	Rencana aksi "Indeks SPBE" di Triwulan II menggunakan anggaran, namun dalam Laporan

		Progres belum diberikan penjelasan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan aksinya
4.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE di rencana aksi "Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025 - 2027" di Triwulan II melaksanakan kegiatan Pelatihan Transisi Arsitektur Pemerintah tanggal 2-4 Juni 2025. Namun, dalam Laporan Progres belum diberikan penjelasan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan aksinya
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	<p>Terdapat indikator <i>output</i> pada Triwulan II yang belum memenuhi secara kualitas kegiatan terhadap ekspektasi rencana aksi RB, yaitu "Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI". Eviden dinilai belum tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya terutama dalam hal jumlah rencana aksi PK yang dilampirkan belum lengkap sesuai rencana aksi.</p> <p>Selain itu, terdapat 3 indikator <i>output</i> yang telah dijabarkan dalam Laporan Progres namun belum dilampirkan evidennya dalam <i>cloud</i> sehingga tidak dapat dipastikan evidennya memenuhi ekspektasi rencana aksi atau tidak. Adapun 3 indikator <i>output</i> tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi;</li> <li>b) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal; dan</li> <li>c) Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja</li> </ul>
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Dalam indikator <i>output</i> "Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target Reformasi Birokrasi sesuai rencana atas indikator ZI" telah dilampirkan Laporan Progres Triwulan II yang disebutkan terdapat 7 Unit Kerja yang telah diajukan kepada Kementerian PANRB untuk dilakukan evaluasi oleh TPN, namun berdasarkan dokumen yang tersedia belum terdapat Laporan Pendampingan Zona Integritas Biro Sumber Daya Manusia Aparatur seperti 6 Unit Kerja yang lainnya
7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian	Dalam Laporan Progres tidak dijelaskan mengenai telah disusun SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan

	Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi SPIP. Sehingga, belum terdapat <i>output</i> SK PM dan SK PK yang disampaikan
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan Diskusi dengan tema Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menggunakan Aplikasi SP4N LAPOR! tanggal 23 Juni 2025, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 4.050.000. Namun, untuk rencana aksi "Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat" terdapat 2 anggaran (Rp 4.050.000 dan Rp 4.050.000) yang hanya dilaksanakan pada Triwulan II
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Terdapat 2 dari 3 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas dengan catatan sebagai berikut: a) Kegiatan Pendampingan Pembangunan Unit ZI menuju WBK/WBBM di lingkup tugas pengawasan Inspektorat II telah dilakukan namun belum menggambarkan adanya Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan Unit ZI Triwulan II; dan b) Belum dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPI KPK pada Triwulan II
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Perlu dilakukan konfirmasi dalam hal pemenuhan kualitas kegiatan terhadap ekspektasi rencana aksi RB untuk hal-hal berikut: a) Terdapat perbedaan <i>output</i> dari indikator <i>output</i> "Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang". Pada rencana aksi <i>output</i> yang dihasilkan adalah Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sedangkan <i>output</i> Surat Tugas tersebut untuk menyusun Buku Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Perlu dilakukan konfirmasi apakah <i>output</i> tersebut dapat dipersamakan atau tidak dengan yang dimaksud dalam rencana aksi; b) Perlu konfirmasi mengenai pelaksanaan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK untuk periode bulan Mei dan Juni, mengingat ada eviden serupa pada bulan Januari-April.

		<p>Selain itu, terdapat 4 indikator <i>output</i> yang telah dijabarkan dalam rencana aksi namun belum dilampirkan evidennya dalam <i>cloud</i> sehingga tidak dapat dipastikan evidennya memenuhi ekspektasi rencana aksi atau tidak. Adapun 4 indikator <i>output</i> tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen terkait kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP);</li> <li>b) Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>;</li> <li>c) Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI;</li> </ul>
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Terdapat 1 dari 8 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas yaitu belum terlampir data dukung berupa Laporan Kegiatan dan BAST kegiatan Digitalisasi Kaset <i>Fit</i> dan <i>Proper Test</i>
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terdapat 1 dari 3 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas yaitu belum terlampir data dukung berupa Dokumen Pembaharuan Rencana Aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ Triwulan II
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Dokumen Laporan Revisi Kewenangan Kanwil/DJA”, data dukung yang dilampirkan berupa rekap Revisi IKPA dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> <li>b) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Pemutakhiran RPD”, data dukung yang dilampirkan berupa rekap dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> <li>c) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Penyerapan Anggaran”, data dukung yang dilampirkan berupa <i>file</i> dokumen indikator penyerapan dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> </ul>

		<p>d) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Penyelesaian Tagihan”, data dukung yang dilampirkan berupa <i>file</i> dokumen data indikator penyelesaian tagihan dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</p> <p>e) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Capaian <i>Output</i>”, data dukung yang dilampirkan berupa <i>file</i> dokumen data penilaian IKPA Capaian <i>Output</i> Biro dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani</p>
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>a) Pada indikator <i>output</i> “Tersusunnya Laporan Keuangan dengan tepat waktu” rencana aksi “Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal”, data dukung yang dilampirkan berupa dokumen Hasil Rekonsiliasi SAKTI SPAN dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani; dan</p> <p>b) Pada indikator <i>output</i> “Tersusunnya Laporan Keuangan dengan Tepat Waktu” rencana aksi “Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal”, data dukung yang dilampirkan berupa Hasil Rekonsiliasi Data Utang dan Piutang Negara Antara PT Taspen dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI per 30 Juni 2025 di Hotel Doubletree Cikini Jakarta Pusat, serta dokumen Permintaan Data Resiprokal, permintaan data untuk perlengkapan dan kendaraan, permintaan data untuk perijin, permintaan data untuk BMN, dan permintaan data keuangan akrual (revisi) dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani</p>
17.	Indeks Sistem Merit	Belum terdapat data dukung yang dilampirkan untuk setiap indikator yang ditargetkan pada Triwulan II, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
18.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II

19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>a) Indikator "Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI" dilaksanakan lebih cepat dari rencana aksi. Seharusnya Triwulan II namun dilaksanakan di Triwulan I;</p> <p>b) Pada <i>output</i> dan Laporan Progres dari Indikator "Kuesioner, <i>link</i>, <i>barcode</i> tersedia" belum diberikan penjelasan realisasi waktunya;</p> <p>c) Pada indikator "Pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan Hasil Survei Terintegrasi yang dapat di akses perkembangan oleh PIC Unit Kerja terkait" belum diberikan penjelasan dalam Laporan Progres;</p> <p>d) Pada indikator "Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditetapkannya Satgas SKM di setiap Unit Kerja Eselon II":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilampirkan Laporan dan Daftar Hadir Sosialisasi SKM terhadap layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, tanggal 25 April 2025;</li> <li>• Belum diberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SKM terhadap layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, tanggal 25 April 2025</li> </ul> <p>e) Pada indikator "Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI" belum dilampirkan Surat Tugas Tim SKM terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun</p>

		<p>2025 (yang bertanggung jawab untuk seluruh Unit Eselon II);</p> <p>f) Pada indikator “Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesetjengan DPR RI Secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diberikan penjelasan waktu pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan <i>screenshot platform</i> WhatsApp Group forum komunikasi antar koordinator dan eviden pendukung dalam Penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan;</li> <li>• Dalam Laporan Progres dan eviden belum diberikan penjelasan pelaksanaan survei yang Sesuai Standar, Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan, serta jumlah dan kualitas kuesioner yang terisi, serta bagaimana hasil survei tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;</li> <li>• Belum diberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran.</li> </ul> <p>g) Pada indikator "Tersedianya <i>update</i> data pengisian kuesioner", belum dilampirkan eviden (<i>ouput</i>) dan diberikan penjelasan di Laporan Progres mengenai pelaksanaan aksi "Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI secara Terintegrasi, Berkelanjutan, Dan Berkesinambungan" dengan indikator "Tersedianya <i>update</i> data pengisian kuesioner”;</p> <p>h) Pada indikator "Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI" belum dilampirkan eviden dan diberikan penjelasan di Laporan Progres mengenai pelaksanaan aksi "Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI secara Terintegrasi, Berkelanjutan, Dan Berkesinambungan" dengan indikator "Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei</p>
--	--	--

		Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI"
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Seluruh rencana aksi Triwulan II belum memenuhi secara kualitas dikarenakan belum terlampir data dukung berupa: a) Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim; b) Laporan Pelaksanaan Lomba Kompetisi Inovasi Internal; c) Laporan Hasil SKM Per Semester; d) Laporan FKP; dan e) Progres Pengembangan Aplikasi Mall Pelayanan Publik Online ( <i>One Stop Information Service</i> )
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Terdapat 1 dari 2 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas yaitu data dukung Dokumentasi Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 dinilai telah mampu menjawab rencana aksi atas tersusunnya Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029, namun belum dilampirkan dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 yang telah diformalkan

### C. KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berkualitas, yang belum menggambarkan: a) Target yang ditetapkan untuk setiap aspek penyederhanaan birokrasi; b) Kebijakan/Program Penyederhanaan Birokrasi: termasuk area fokusnya (misalnya, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, penyetaraan jabatan fungsional); c) Dalam saran, belum tergambar usulan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan efektivitas program selain dari penerapan pendekatan keeluasaan ke Kementerian PANRB; d) Belum dilampirkan dokumen pendukung (Kebijakan, Pedoman, Notulen Rapat terkait)

2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berkualitas, yang belum menggambarkan: a) Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Tahun 2025; b) Daftar SOP yang diperbaiki pasca penyederhanaan birokrasi (di Laporan Progres ada namun di Laporan Monitoring dan Evaluasi tidak ada); dan c) Belum dilampirkan dokumen pendukung (Kebijakan, Pedoman, Notulen rapat terkait)
3.	Indeks SPBE	Rencana aksi "Indeks SPBE" di Triwulan II menggunakan anggaran, namun dalam Laporan Progres belum diberikan penjelasan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan aksinya
4.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE di rencana aksi "Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025 - 2027" di Triwulan II melaksanakan kegiatan Pelatihan Transisi Arsitektur Pemerintah tanggal 2-4 Juni 2025. Namun, dalam Laporan Progres belum diberikan penjelasan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan aksinya
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Terdapat 3 indikator <i>output</i> yang telah dijabarkan dalam Laporan Progres namun belum dilampirkan evidennya dalam <u>cloud</u> sehingga tidak dapat dipastikan evidennya memenuhi ekspektasi kualitas manajemen dalam hal keabsahan dokumen yang dilampirkan. Adapun 3 indikator <i>output</i> tersebut, yaitu: a) Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi; b) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal; dan c) Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas manajemen dalam pelaksanaan aksi
7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Dalam Laporan Progres tidak dijelaskan mengenai telah disusun SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah

		mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi SPIP. Sehingga, belum terdapat <i>output</i> SK PM dan SK PK yang disampaikan
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan Diskusi dengan tema Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menggunakan Aplikasi SP4N LAPOR! tanggal 23 Juni 2025, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 4.050.000. Namun, untuk rencana aksi "Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan Unit Kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat" terdapat 2 anggaran (Rp 4.050.000 dan Rp 4.050.000) yang hanya dilaksanakan pada Triwulan II
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Terdapat 2 dari 3 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas dengan catatan sebagai berikut: a) Kegiatan Pendampingan Pembangunan Unit ZI menuju WBK/WBBM di lingkup tugas pengawasan Inspektorat II telah dilakukan, namun belum menggambarkan adanya Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan Unit ZI Triwulan II; dan b) Belum dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPI KPK pada Triwulan II
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Terdapat 2 indikator <i>output</i> dengan eviden berupa laporan yang belum dapat diyakini keabsahannya karena tidak diformalkan/ditandatangani. Adapun 2 indikator <i>output</i> tersebut adalah: a) Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar); dan b) Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Terdapat 1 dari 8 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas yaitu belum terlampir data dukung berupa Laporan Kegiatan dan BAST kegiatan Digitalisasi Kaset <i>Fit</i> dan <i>Proper Test</i>

13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terdapat 1 dari 3 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas yaitu belum terlampir data dukung berupa Dokumen Pembaharuan Rencana Aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ Triwulan II
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>Pelaksanaan kegiatan sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi karena terdapat data dukung terlampir masih dalam bentuk excel, belum tergambar dalam bentuk laporan sesuai dengan satuan <i>output</i>nya dan belum ditandatangani, dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Dokumen Laporan Revisi Kewenangan Kanwil/DJA”, data dukung yang dilampirkan berupa rekap Revisi IKPA dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> <li>b) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Pemutakhiran RPD”, data dukung yang dilampirkan berupa rekap dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> <li>c) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Penyerapan Anggaran”, data dukung yang dilampirkan berupa <i>file</i> dokumen indikator penyerapan dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> <li>d) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Penyelesaian Tagihan”, data dukung yang dilampirkan berupa <i>file</i> dokumen data indikator penyelesaian tagihan dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</li> <li>e) Pada indikator <i>output</i> “Tersedianya Laporan Capaian <i>Output</i>”, data dukung yang dilampirkan berupa <i>file</i> dokumen data penilaian IKPA Capaian <i>Output</i> Biro dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani</li> </ul>
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Pelaksanaan kegiatan sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi karena terdapat data dukung belum tergambar

		<p>dalam bentuk laporan sesuai dengan satuan <i>output</i>nya dan belum ditandatangani, dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>a) Pada indikator <i>output</i> "Tersusunnya Laporan Keuangan dengan tepat waktu" rencana aksi "Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal", data dukung yang dilampirkan berupa dokumen Hasil Rekonsiliasi SAKTI SPAN dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani; dan</p> <p>b) Pada indikator <i>output</i> "Tersusunnya Laporan Keuangan dengan Tepat Waktu" rencana aksi "Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal", data dukung yang dilampirkan berupa Hasil Rekonsiliasi Data Utang dan Piutang Negara Antara PT Taspen dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI per 30 Juni 2025 di Hotel Doubletree Cikini Jakarta Pusat, serta dokumen Permintaan Data Resiprokal, permintaan data untuk perlengkapan dan kendaraan, permintaan data untuk perijin, permintaan data untuk BMN, dan permintaan data keuangan akrual (revisi) dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani</p>
17.	Indeks Sistem Merit	Belum terdapat data dukung yang dilampirkan untuk setiap indikator yang ditargetkan pada Triwulan II, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
18.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum menggambarkan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>a) Indikator "Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI" dilaksanakan lebih cepat dari rencana aksi. Seharusnya Triwulan II, namun dilaksanakan di Triwulan I;</p>

		<p>b) Pada <i>output</i> dan Laporan Progres dari Indikator "Kuesioner, <i>link</i>, <i>barcode</i> tersedia" belum diberikan penjelasan realisasi waktunya;</p> <p>c) Pada indikator "Pengembangan Aplikasi SKM untuk Pengelolaan Hasil Survei Terintegrasi yang dapat di akses perkembangannya oleh PIC Unit Kerja terkait" belum diberikan penjelasan dalam Laporan Progres;</p> <p>d) Pada indikator "Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditetapkan Satgas SKM di setiap Unit Kerja Eselon II":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum dilampirkan Laporan dan Daftar Hadir Sosialisasi SKM terhadap layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, tanggal 25 April 2025;</li> <li>• Belum diberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SKM terhadap layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, tanggal 25 April 2025</li> </ul> <p>e) Pada indikator "Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI" belum dilampirkan Surat Tugas Tim SKM terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 (yang bertanggung jawab untuk seluruh Unit Eselon II);</p> <p>f) Pada indikator "Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diberikan penjelasan waktu pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan <i>screenshot platform</i> WhatsApp Group forum komunikasi antar koordinator dan eviden pendukung dalam Penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan;</li> <li>• Dalam Laporan Progres dan eviden belum diberikan penjelasan Pelaksanaan Survei</li> </ul>
--	--	---

		<p>yang Sesuai Standar, Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan, serta jumlah dan kualitas kuesioner yang terisi, serta bagaimana hasil survei tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran.</li> </ul> <p>g) Pada indikator "Tersedianya <i>update</i> data pengisian kuesioner", belum dilampirkan eviden (<i>ouput</i>) dan diberikan penjelasan di Laporan Progres mengenai pelaksanaan aksi "Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan" dengan indikator "Tersedianya <i>update</i> data pengisian kuesioner";</p> <p>h) Pada indikator "Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI" belum dilampirkan eviden dan diberikan penjelasan di Laporan Progres mengenai pelaksanaan aksi "Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan" dengan indikator "Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI"</p>
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>Seluruh rencana aksi Triwulan II belum memenuhi secara kualitas dikarenakan belum terlampir data dukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim;</li> <li>b) Laporan Pelaksanaan Lomba Kompetisi Inovasi Internal;</li> <li>c) Laporan Hasil SKM Per Semester;</li> <li>d) Laporan FKP; dan</li> <li>e) Progres Pengembangan Aplikasi Mall Pelayanan Publik Online (<i>One Stop Information Service</i>)</li> </ol>
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	<p>Terdapat 1 dari 2 rencana aksi yang belum memenuhi secara kualitas yaitu data dukung Dokumentasi Penyusunan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 dinilai telah mampu</p>

		menjawab rencana aksi atas tersusunnya Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029, namun belum dilampirkan dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 yang telah diformalkan
--	--	--

**D. REKOMENDASI EVALUASI RB ON-GOING GENERAL TRIWULAN II**

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar Laporan Progres "Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi" diberikan penjelasan anggaran;</li> <li>2. Agar Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi dapat menggambarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Target yang ditetapkan untuk setiap aspek penyederhanaan birokrasi;</li> <li>b) Kebijakan/Program Penyederhanaan Birokrasi: termasuk area fokusnya (misalnya, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, penyetaraan jabatan fungsional);</li> <li>c) Dalam saran, belum tergambar usulan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan efektivitas program selain dari penerapan pendekatan keleluasaan ke Kementerian PANRB;</li> <li>d) Dilampirkan dokumen pendukung (Kebijakan, Pedoman, Notulen Rapat terkait)</li> </ol> </li> </ol>
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar Laporan Progres "Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi" diberikan penjelasan anggaran;</li> <li>2. Agar Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi dapat menggambarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Target yang ditetapkan untuk setiap aspek penyederhanaan birokrasi;</li> <li>b) Kebijakan/Program Penyederhanaan Birokrasi: termasuk area fokusnya (misalnya, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, penyetaraan jabatan fungsional);</li> <li>c) Dalam saran, belum tergambar usulan langkah-langkah konkret yang harus</li> </ol> </li> </ol>

		diambil untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan efektivitas program selain dari penerapan pendekatan keleluasaan ke Kementerian PANRB
3.	Indeks SPBE	Agar dalam laporan progres "Indeks SPBE" di Triwulan II diberikan penjelasan penggunaan anggaran
4.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	<p>a) Agar rencana aksi "Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI" dengan indikator "Tersusunnya Kebijakan Arsitektur SPBE dan disosialisasikan kepada unit terkait" merevisi target rencana aksi agar sesuai dengan realisasi <i>outputnya</i>;</p> <p>b) Agar rencana aksi "Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi" dengan indikator "Tersusunnya Kebijakan Standar Manajemen Data", merevisi target rencana aksi agar sesuai dengan realisasi <i>outputnya</i>;</p> <p>c) Rencana aksi "Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027" di Triwulan II melaksanakan kegiatan Pelatihan Transisi Arsitektur Pemerintah tanggal 2-4 Juni 2025. Agar dalam Laporan Progres diberikan penjelasan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan aksinya</p>
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	<p>a) Agar melengkapi lampiran data dukung berupa rencana aksi PK yang belum terdapat dalam <u>cloud</u>, yaitu: rencana aksi PK milik Deputy Administrasi, Deputy Persidangan, dan PUU Ekuinbangkesra;</p> <p>b) Agar dapat melampirkan data dukung yang belum dilampirkan agar menunjukkan keselarasan laporan progres Triwulan II dengan <u>cloud</u> yang dijadikan sumber pengumpulan data dukung. Data dukung yang belum ada tersebut terkait dengan indikator <i>output</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi;</li> <li>Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal; dan</li> <li>Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Unit Kerja</li> </ol>
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja:	Agar dapat melengkapi lampiran data dukung berupa Laporan Kegiatan Pendampingan

	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Pembangunan Unit Zona Integritas menuju WBK di Biro SDMA
7.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	<p>a) Agar rencana aksi dapat disesuaikan (direvisi);</p> <p>b) Agar dalam Laporan Progres dijelaskan mengenai telah disusun SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi SPIP. Agar dilampirkan juga <i>output</i> SK PM dan SK PK pada folder eviden</p>
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Agar menyesuaikan rencana aksi dan Laporan Progress Terkait anggaran yang digunakan pada Triwulan II
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>1. Agar melampirkan data dukung atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2025;</p> <p>2. Agar melampirkan data dukung berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPI KPK Triwulan II</p>
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	<p>a) Agar melampirkan data dukung Laporan Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ke Provinsi Bengkulu tanggal 18-20 Juni 2025 yang telah ditandatangani/diformalkan;</p> <p>b) Agar melampirkan Prosiding FGD Evaluasi dan Penataan Undang-Undang di Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Sinergitas Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditandatangani/diformalkan untuk menunjukkan keabsahan dokumen;</p> <p>c) Agar melampirkan data dukung dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden, terkait indikator aksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen terkait kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, dan SOP);</li> <li><i>Benchmarking</i> Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI; dan</li> <li>iv. <i>Screenshot</i> bukti <i>upload</i> di media sosial terkait rencana aksi “Mengunggah aktifitas pengelolaan dan pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)</li> </ul>
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-
12.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Agar melampirkan data dukung berupa Laporan Kegiatan dan BAST Kegiatan Digitalisasi Kaset <i>Fit</i> dan <i>Proper Test</i>
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Agar melampirkan dokumen pembaharuan rencana aksi Pemenuhan SDM Pengelola PBJ Triwulan II
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Agar melampirkan data dukung Dokumen Laporan Revisi Kewenangan Kanwil/DJA sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</li> <li>b) Agar memutakhirkan data dukung Pemutakhiran RPD sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</li> <li>c) Agar melampirkan data dukung Laporan Penyerapan Anggaran sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</li> <li>d) Agar melampirkan data dukung Laporan Penyelesaian Tagihan sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</li> <li>e) Agar melampirkan data dukung Laporan Capaian <i>Output</i>, sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani</li> </ul>
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	-

16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	<p>a) Agar melampirkan data dukung Laporan Keuangan dengan Tepat Waktu sesuai rencana aksi "Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal", sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</p> <p>b) Agar melampirkan data dukung Laporan Keuangan dengan Tepat Waktu sesuai rencana aksi "Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal" sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani</p>
17.	Indeks Sistem Merit	<p>Agar melampirkan data dukung dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden, terkait indikator aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dokumen Penyempurnaan dan Penambahan fitur SIMATA;</li> <li>ii. Terlaksananya Sosialisasi SIMATA;</li> <li>iii. Pedoman Pengelolaan Kinerja;</li> <li>iv. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu;</li> <li>v. Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu</li> </ul>
18.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	-
19.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	<p>a) Agar disesuaikan pada rencana aksi (revisi rencana aksi) terkait dengan indikator "Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dilaksanakan lebih cepat dari rencana aksi;</p> <p>b) Agar diberikan penjelasan realisasi waktunya pada <i>output</i> dan Laporan Progres dari Indikator "Kuesioner, <i>link</i>, <i>barcode</i> tersedia";</p> <p>c) Agar diberikan penjelasan eviden pada Laporan Progres untuk indikator "Pengembangan Aplikasi SKM untuk Pengelolaan Hasil Survei Terintegrasi yang dapat di akses perkembangan oleh PIC Unit Kerja terkait";</p> <p>d) Agar dapat melampirkan Laporan dan Daftar Hadir Sosialisasi SKM terhadap layanan</p>

		<p>Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, tanggal 25 April 2025 dan diberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SKM terhadap layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025, tanggal 25 April 2025 untuk mendukung indikator "Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditetapkannya Satgas SKM di setiap Unit Kerja Eselon II";</p> <p>e) Pada indikator "Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI" agar melampirkan Surat Tugas Tim SKM terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 (yang bertanggung jawab untuk seluruh Unit Eselon II);</p> <p>f) Pada indikator "Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesenjangan DPR RI Secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Agar diberikan penjelasan waktu pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan <i>screenshot platform</i> WhatsApp Group forum komunikasi antarkoordinator dan eviden pendukung dalam Penyelenggaraan Survei Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan;</li> <li>Dalam Laporan Progres dan eviden agar diberikan penjelasan pelaksanaan Survei yang Sesuai Standar, Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan, serta jumlah dan kualitas kuesioner yang terisi, serta bagaimana hasil survei tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;</li> <li>Agar diberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran.</li> </ol> <p>g) Pada indikator "Tersedianya <i>update</i> data pengisian kuesioner", agar dilampirkan eviden (<i>output</i>) dan diberikan penjelasan di Laporan Progres mengenai pelaksanaan aksi</p>
--	--	---

		<p>"Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan" dengan indikator "Tersedianya <i>update</i> data pengisian kuesioner";</p> <p>h) Pada Indikator "Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI" agar dilampirkan eviden dan diberikan penjelasan di Laporan Progres mengenai pelaksanaan aksi "Terlaksananya Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Secara Terintegrasi, Berkelanjutan, dan Berkesinambungan" dengan indikator "Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI"</p>
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>a) Agar melampirkan data dukung terkait Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim;</p> <p>b) Agar melampirkan data dukung terkait Laporan Pelaksanaan Lomba Kompetisi Inovasi Internal;</p> <p>c) Agar melampirkan data dukung terkait Laporan Hasil SKM Per Semester;</p> <p>d) Agar melampirkan data dukung terkait Laporan FKP; dan</p> <p>e) Agar melampirkan data dukung terkait Progres Pengembangan Aplikasi Mall Pelayanan Publik Online (<i>One Stop Information Service</i>)</p>
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Agar melampirkan dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 yang telah ditandatangani

#### E. EVALUASI RB *ON-GOING* TEMATIK TRIWULAN II

NO	AKSI	KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI ( <i>OUTPUT</i> DAN WAKTU)	KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB TEMATIK	KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB TEMATIK
1.	Pengentasan Kemiskinan	Terdapat 5 dari 8 rencana aksi yang belum tercapai	Seluruh rencana aksi Triwulan II belum memenuhi	Seluruh rencana aksi Triwulan II belum memenuhi

		<p><i>output</i> aksi di Triwulan II dikarenakan data dukung belum dilampirkan sehingga secara waktu pelaksanaan dinilai tidak tepat waktu, yaitu:</p> <p>a) Laporan Penguatan Analisis dan Kajian terkait Ketahanan Pangan;</p> <p>b) Progres Pelaksanaan Monitoring Pemanfaatan Sistem;</p> <p>c) Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring yang menunjukkan Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Dalam Fungsi Legislatif DPR;</p> <p>d) Progres Pengembangan Kuesioner dan Instrumen Survei Pemanfaatan Hasil Kajian oleh Anggota DPR RI;</p> <p>e) Pelaksanaan Survei kepada Anggota DPR RI</p>	<p>secara kualitas dikarenakan:</p> <p>a) Belum terdapat data dukung berupa Laporan Penguatan Analisis dan Kajian terkait Ketahanan Pangan;</p> <p>b) Data dukung yang dilampirkan berupa Daftar Nama Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinilai telah mampu menjawab rencana aksi secara kualitas, namun perlu ditambahkan dokumen resmi yang diformalkan terkait pembentukan Tim;</p> <p>c) Data dukung yang dilampirkan berupa Hasil Kajian Ketahanan</p>	<p>secara kualitas dikarenakan:</p> <p>a) Belum terdapat data dukung berupa Laporan Penguatan Analisis dan Kajian terkait Ketahanan Pangan;</p> <p>b) Data dukung yang dilampirkan berupa Daftar Nama Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinilai telah mampu menjawab rencana aksi secara kualitas, namun perlu ditambahkan dokumen resmi yang diformalkan terkait pembentukan Tim;</p> <p>c) Data dukung yang dilampirkan berupa Hasil Kajian</p>
--	--	---	---	---

			<p>Pangan berupa Info Sepekan, <i>Policy Brief</i>, dan Info Singkat, namun indikator <i>output</i> berupa NA dan Draft RUU sehingga secara kualitas belum memenuhi;</p> <p>d) Data dukung yang dilampirkan berupa <i>flowchart</i> cara mengakses hasil kajian melalui Nusantara SuperApp dinilai telah mampu menjawab rencana aksi secara kualitas, namun perlu ditambahkan <i>link</i> menuju Nusantara SuperApp atau <i>screenshot</i> folder hasil kajian kemiskinan yang menunjukkan bahwa <i>input</i> data kajian telah dilakukan secara berkala;</p>	<p>Ketahanan Pangan berupa Info Sepekan, <i>Policy Brief</i>, dan Info Singkat, namun indikator <i>output</i> berupa NA dan Draft RUU sehingga secara kualitas belum memenuhi;</p> <p>d) Data dukung yang dilampirkan berupa <i>flowchart</i> cara mengakses hasil kajian melalui Nusantara SuperApp dinilai telah mampu menjawab rencana aksi secara kualitas, namun perlu ditambahkan <i>link</i> menuju Nusantara SuperApp atau <i>screenshot</i> folder hasil kajian kemiskinan yang menunjukkan bahwa <i>input</i> data kajian telah dilakukan</p>
--	--	--	---	---

			<p>e) Belum terdapat data dukung Proses Pelaksanaan dan Monitoring Pemanfaatan Sistem;</p> <p>f) Belum terdapat data dukung berupa Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring yang menunjukkan Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Dalam Fungsi Legislatif DPR;</p> <p>g) Belum terdapat data dukung berupa Progress Pengembalian Kuesioner dan Instrumen Survei Pemanfaatan Hasil Kajian oleh Anggota DPR RI;</p> <p>h) Belum terdapat data dukung pelaksanaan survei kepada Anggota DPR RI</p>	<p>secara berkala;</p> <p>e) Belum terdapat data dukung Proses Pelaksanaan dan Monitoring Pemanfaatan Sistem;</p> <p>f) Belum terdapat data dukung berupa Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring yang menunjukkan Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Dalam Fungsi Legislatif DPR;</p> <p>g) Belum terdapat data dukung berupa Progress Pengembalian Kuesioner dan Instrumen Survei Pemanfaatan Hasil Kajian oleh Anggota DPR RI;</p> <p>h) Belum terdapat data dukung pelaksanaan survei kepada Anggota DPR RI</p>
--	--	--	--	---

2.	Realisasi Investasi	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan tercapai dengan hasil yang memenuhi target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target
3.	Digitalisasi Pemerintahan	Pelaksanaan aksi atas sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum dapat memenuhi target <i>output</i> sesuai indikator yang ditetapkan. Sebagian pelaksanaan aksi belum tepat waktu karena data dukung yang disampaikan belum sesuai dengan indikator <i>output</i> yang ditargetkan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: a) Data dukung rencana aksi Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah belum dapat menjawab ekspektasi karena pada indikator <i>output</i> dinyatakan berupa dokumentasi dan laporan, namun pada drive belum terdapat Laporan Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah; b) Belum selarasnya rencana aksi	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: a) Data dukung rencana aksi Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah belum dapat menjawab ekspektasi karena pada indikator <i>output</i> dinyatakan berupa dokumentasi dan laporan, namun pada drive belum terdapat Laporan Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah;

			<p>dengan Laporan Progres Triwulan II. Dalam Laporan Progres dinyatakan rencana aksi dan realisasinya untuk Triwulan II adalah “Inventarisasi Dokumen dan/atau Kajian terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah”, sedangkan pada rencana aksi adalah “Penyusunan Kajian dan Analisis terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah”;</p> <p>c) Belum terdapat data dukung yang menunjukkan penginputan tujuh dokumen dalam melaksanakan rencana aksi “Input Data dan Dokumen secara berkala pada <i>Repository Digital</i> tentang Digitalisasi Administrasi Pemerintah”</p>	<p>b) Belum selarasnya rencana aksi dengan Laporan Progres Triwulan II. Dalam Laporan Progres dinyatakan rencana aksi dan realisasinya untuk Triwulan II adalah “Inventarisasi Dokumen dan/atau Kajian terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah”, sedangkan pada rencana aksi adalah “Penyusunan Kajian dan Analisis terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah”;</p> <p>c) Belum terdapat data dukung yang menunjukkan penginputan tujuh dokumen dalam melaksanakan rencana aksi “Input Data dan Dokumen secara berkala pada <i>Repository</i></p>
--	--	--	--	---

				<i>Digital tentang Digitalisasi Administrasi Pemerintah</i>
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Pelaksanaan aksi atas sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan II belum dapat memenuhi target <i>output</i> sesuai indikator yang ditetapkan. Sebagian pelaksanaan aksi belum tepat waktu karena data dukung yang disampaikan belum sesuai dengan indikator <i>output</i> yang ditargetkan	Sebagian indikator yang ditetapkan pada Triwulan II belum memiliki eviden yang memadai, karena data dukung yang tersedia belum mampu menjawab rencana aksi akibat belum tersusunnya Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi RUP Tahun 2025	Sebagian indikator yang ditetapkan pada Triwulan II belum memiliki eviden yang memadai, karena data dukung yang tersedia belum mampu menjawab rencana aksi akibat belum tersusunnya Laporan Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi RUP Tahun 2025
5.	Pengendalian Inflasi	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan tercapai dengan hasil yang memenuhi target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target

#### F. REKOMENDASI EVALUSAI RB ON-GOING TEMATIK TRIWULAN II

NO	AKSI	REKOMENDASI
1.	Pengentasan Kemiskinan	a) Agar melampirkan data dukung berupa Laporan Penguatan Analisis dan Kajian terkait Ketahanan Pangan; b) Agar menambahkan dokumen resmi yang diformalkan terkait dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; c) Agar menambahkan dokumen NA dan Draft RUU tentang Ketahanan Pangan;

		<p>d) Agar menambahkan <i>link</i> akses ke Nusantara SuperApp atau <i>screenshot</i> folder kajian kemiskinan;</p> <p>e) Agar melampirkan data dukung progress pelaksanaan monitoring pemanfaatan sistem;</p> <p>f) Agar melampirkan data dukung berupa Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring yang menunjukkan Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Fungsi Legislatif DPR;</p> <p>g) Agar melampirkan data dukung berupa Progres Pengembangan Kuesioner dan Instrumen Survei Pemanfaatan Hasil Kajian oleh Anggota DPR;</p> <p>h) Agar melampirkan data dukung pelaksanaan survei kepada Anggota DPR</p>
2.	Realisasi Investasi	-
3.	Digitalisasi Pemerintahan	<p>a) Agar dapat melampirkan data dukung yang relevan dengan indikator <i>output</i> yang disebutkan dalam rencana aksi, yaitu kegiatan tersusunnya sistem atau <i>platform</i> yang memungkinkan Anggota DPR mengakses hasil kajian dengan mudah dan cepat, baik untuk bahan rapat, pembahasan RUU atau pengambilan keputusan lainnya;</p> <p>b) Agar dapat menambahkan data dukung berupa Laporan Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi terkait Digitalisasi Administrasi Pemerintah</p>
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Agar melampirkan data dukung terkait Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi RUP Tahun 2025
5.	Pengendalian Inflasi	-